



LAPORAN DELEGASI DPR RI

11TH EDITION OF THE BRICS PARLIAMENTARY FORUM

3-5 Juni 2025 Brasilia - Brazil



THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2025



**LAPORAN
DELEGASI DPR RI
11TH EDITION OF
THE BRICS
PARLIAMENTARY
FORUM**

3-5 Juni 2025 di
Brasilia - Brazil



LAPORAN
DELEGASI BKSAP DPR RI MENGHADIRI
11th EDITION OF THE BRICS PARLIAMENTARY FORUM
3-5 JUNI 2025 DI BRASILIA - BRAZIL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, BRICS kian memantapkan dirinya sebagai platform multilateral yang fundamental untuk kerja sama ekonomi dan untuk mempromosikan tata kelola global yang lebih inklusif.

Pada tahun 2025, Brasil mengambil alih jabatan presiden bergilir BRICS. Dengan moto "Memperkuat Kerja Sama Global Selatan untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", BRICS aktif mengangkat dua isu prioritas. Pertama: Kerja Sama Global Selatan, dan kedua Kemitraan BRICS untuk Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan.

Berdasarkan dua isu prioritas tersebut di atas, Brasil mengusulkan enam topik inti yang dijadikan Paduan selama memegang jabatan sebagaipresidensi BRICS. Yaitu pertama Kerja Sama dalam Kesehatan Global, kedua Perdagangan, Investasi, dan Keuangan, ketiga Perubahan Iklim. Selanjutnya keempat Tata Kelola Kecerdasan Buatan, kelima Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Multilateral serta terakhir Pengembangan Kelembagaan.

Sejak pertemuan pertamanya di Moskow pada tahun 2015 lalu, Forum Parlemen BRICS telah menjadi mekanisme penting untuk memperkuat dialog dan kerja sama antarpemerintah antara negara-negara anggota.

Perlu disepakati scenario global dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks, seperti munculnya kebijakan proteksionis dan melemahnya multilateralisme. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi BRICS untuk mengedepankan dialog antarpemerintah dan menghasilkan resolusi atas isu-isu

penting yang merasuki tatanan dunia dan secara langsung memengaruhi negara-negara BRICS. Mengingat format blok yang diperluas, yang memberinya keterwakilan yang lebih besar.

Forum Parlemen BRICS ke-11 ini akan diselenggarakan di Gedung Kongres Nasional di Brasilia pada tanggal 4-5 Juni 2025. Agenda ini juga akan didahului dengan Pertemuan Anggota Parlemen Wanita BRICS dan Pertemuan Ketua Komite Urusan Internasional Parlemen BRICS, pada tanggal 3 Juni 2025.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Forum Parlemen BRICS ke-11 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/KU.05.01/ST/KSOI/1/2025

C. Susunan Delegasi

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Dr. Mardani Ali Sera	F. PKS	Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2.	M. Husein Fadlulloh	F. Gerindra	Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi

D. Tujuan Pengiriman Delegasi

1. Menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil parlemen sebagai strategi dalam penguatan sosial, ekonomi dan tata kelola lingkungan.
2. Menyampaikan implementasi yang dapat Indonesia lakukan, terutama parlemen, mengenai kebijakan tentang sosial, ekonomi sekaligus tantangan serta potensi-potensi dari kebijakan yang telah dilakukan di Indonesia.
3. Memanfaatkan Sidang ke-11 Parlemen Negara Anggota BRICS untuk memperkuat dialog multilateral DPR RI dengan berbagai lembaga internasional dan negara-negara sahabat.

E. Visi Misi

Adapun misi delegasi BKSAP DPR RI menghadiri agenda tersebut adalah:

1. Berkontribusi aktif untuk menyoroti langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan parlemen untuk mencapai tujuan-tujuan dalam meningkatkan sosial ekonomi Masyarakat.

2. Memperkuat peran parlemen dan Sidang ke-11 Parlemen Negara Anggota BRICS sebagai wadah, peluang kerja sama serta memperkuat peran serta DPR RI di kancah internasional.

F. Persiapan Pengiriman Delegasi

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri BRICS Parliamentary Forum yang ke-11 ini. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri.

II. LAPORAN DELEGASI

A. Agenda Delegasi

Wednesday 4 June 2025		Location
10:00	Official photo	Black Hall of the National Congress
10:30 - 12:00	Opening ceremony of the 11 th BRICS Parliamentary Forum	Plenary of the Federal Senate
12:00 - 14:00	Working lunch	Chamber of Deputies Restaurant
14:00 - 15:30	1 st Working session: BRICS Inter-Parliamentary Alliance for Global Health	Plenary of the Federal Senate
15:30 - 17:00	2 nd Working Session: BRICS Parliamentary Action in Search of New Paths for Economic Development	Plenary of the Federal Senate
19:30 - 22:00	Official dinner of the 11th BRICS Parliamentary Forum	Itamaraty Palace
Thursday 5 June 2025		Location
09:00 - 10:30	3 rd Working Session: BRICS Inter-Parliamentary Dialogue on Climate and Sustainability	Plenary of the Federal Senate
10:30 - 12:00	4 th Working Session: Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence	Plenary of the Federal Senate
12:00 - 14:00	Working lunch	Chamber of Deputies Restaurant
14:00 - 15:30	5 th Working Session: BRICS Parliaments United for the Reform of the Multilateral Peace and Security Architecture	Plenary of the Federal Senate
15:30 - 17:00	6 th Working Session: Towards Stronger and More Durable BRICS Inter-Parliamentary Cooperation	Plenary of the Federal Senate
17:00 - 18:00	Closing session <i>Adoption of Final document and closing remarks</i>	Plenary of the Federal Senate

B. Kegiatan Delegasi

BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRICS saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang dominasi negara Barat dalam tatanan ekonomi dunia. Sejalan dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS pada 6 Januari 2025, DPR RI untuk pertama kali menghadiri pertemuan tahunan BRICS Parliamentary Forum yang diadakan pada tanggal 3-5 Juni 2025 di Brasilia, Brazil. Pertemuan BRICS Parliamentary Forum yang ke-11 tersebut dihadiri oleh parlemen dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—serta negara-negara seperti Indonesia, Iran, Uni Emirat Arab, Nigeria, Ethiopia, Kuba, Bolivia, dan Mesir.

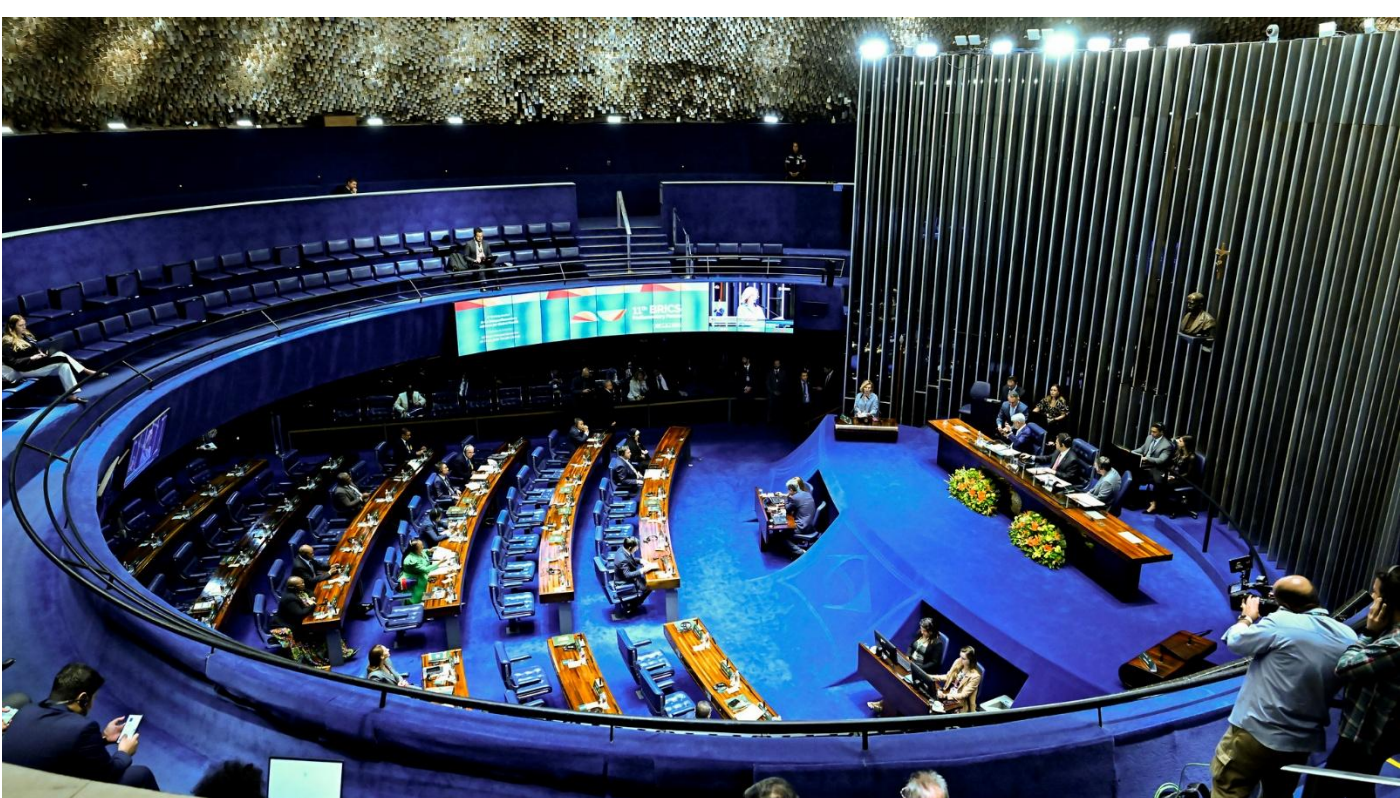


Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera dan Wakil Ketua BKSAP M. Husein Fadlulloh saat *opening ceremony* BRICS *Parliamentary Forum* di Brasilia. Dok: BKSAP

Pada sesi pembukaan perwakilan-perwakilan dari delegasi yang hadir menekankan urgensi peningkatan kerja sama antar negara-negara Selatan Global (Global South) dan penguatan kedaulatan negara-negara berkembang dalam menanggapi tantangan geopolitik saat ini. Para perwakilan tersebut juga menegaskan kembali prioritas jangka panjang BRICS, termasuk reformasi

organisasi multilateral untuk meningkatkan representasi Afrika, Asia, dan Amerika Latin, serta mempromosikan transaksi perdagangan dalam mata uang lokal di antara negara-negara anggota.

Hal-hal yang disampaikan tersebut sejalan dengan tujuan utama BRICS, yaitu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara anggotanya, serta untuk memperkuat pengaruh mereka di panggung global. BRICS juga bertujuan untuk menjadi penyeimbang kekuatan ekonomi dan politik dunia, terutama terhadap dominasi negara-negara Barat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggotanya.



Suasana sidang BRICS *Parliamentary Forum* di Brasilia, Brazil 3-5 Juli 2025. **Dok: BKSAP**

Brics Parliamentary Forum ke 11 yang berlangsung di Brasilia tersebut menghasilkan dokumen deklarasi bersama (joint declaration) yang menggaris bawahi komitmen terhadap kerja sama internasional mengenai isu-isu strategis yang memengaruhi semua negara Brics seperti keberlanjutan, kecerdasan buatan, kerja sama antarpalemen, keamanan, dan perdamaian. Deklarasi juga menyerukan tatanan internasional yang lebih adil, di mana negara-negara berkembang dapat ikut serta mengambil bagian dalam keputusan-keputusan utama. Deklarasi juga menekankan mengenai multilateralisme, kekhawatiran mengenai hambatan perdagangan, dan pembangunan dengan kesetaraan gender.

C. Manfaat Bergabungnya Indonesia ke BRICS

Bagi Indonesia sendiri, bergabung ke BRICS membawa sejumlah manfaat potensial, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Indonesia berpotensi memperluas pasar ekspor, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan alternatif, dan mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi. Secara politis, Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam forum internasional dan memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Disamping itu, Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB) BRICS juga dapat menjadi alternatif sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur di Indonesia, dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan internasional lainnya.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera foto bersama para delegasi BRICS *Parliamentary Forum*.

Dok: BKSAP

Dalam konteks bergabungnya Indonesia ke Organisasi Internasional, persyaratan yang harus diikuti oleh Indonesia ketika akan bergabung ke BRICS lebih fleksibel jika dibandingkan dengan proses aksesi Indonesia ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara Barat mengharuskan negara-negara yang sedang dalam proses aksesi untuk melakukan

serangkaian penyesuaian kebijakan dan regulasi dengan standar yang berlaku di OECD.

Sementara untuk BRICS, negara anggota tidak harus melakukan serangkaian penyesuaian. Penilaian terhadap negara yang akan bergabung lebih berdasarkan pertimbangan strategis seperti; potensi peningkatan akses pasar, kerja sama ekonomi, posisi geopolitik, dan pengaruh global. Selain itu, negara juga melihat peluang untuk mengakses pembiayaan dari New Development Bank (NDB), diversifikasi ekonomi, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya.

BRICS juga dapat meningkatkan daya tawar dan citra diplomasi Indonesia, mengingat bahwa BRICS adalah platform strategis negara-negara berkembang untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global. Dengan menjadi anggota, Indonesia dapat mendorong perubahan yang lebih inklusif, seperti distribusi hak suara yang lebih adil di lembaga-lembaga global seperti World Trade Organization (WTO) dan Bank Dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, Indonesia juga dapat memberikan perspektif baru di BRICS sebagai penyeimbang kebijakan ekonomi global, hal ini akan meningkatkan pengaruh diplomatik internasional Indonesia.

Pola pengembangan organisasi BRICS serupa dengan G20 dimana negara-negara BRICS menyelenggarakan beberapa forum untuk mendorong kerja sama dan dialog antar-anggotanya dan dengan negara-negara lain. Forum-forum ini antara lain Forum Parlemen BRICS (BRICS Parliamentary Forum), Forum Bisnis BRICS, Forum Akademik BRICS, dan Forum Serikat Buruh BRICS. Forum-forum ini membahas berbagai aspek kerja sama, mulai dari bisnis dan perdagangan hingga penelitian akademis dan hubungan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan sesama anggota BRICS dan menggali potensi kerja sama di berbagai bidang.

D. Agenda Pembahasan BRICS Parliamentary Forum

Dalam konteks BRICS Parliamentary Forum, Delegasi Indonesia diwakili oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yaitu Bapak Dr. Mardani Ali Sera dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selaku Ketua BKSAP dan Bapak Hussein Fadlulloh dari Fraksi Partai Gerindra selaku Wakil Ketua BKSAP. Selama forum berlangsung, Delegasi hadir dan aktif menyampaikan pandangan dan posisi DPR RI dalam berbagai isu antara lain:

1. Working Session: Strengthening BRICS Trade in Current International Scenarios
2. Working Session: Promoting Investment and Technology for Sustainable Development
3. Working Session: BRICS Inter-Parliamentary Alliance for Global Health

4. Working Session: Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence
5. Working Session: BRICS Parliamentary United for the Reform of Multilateral Peace and Security Architecture.

E. Kontribusi Delegasi

1. Working Session: Strengthening BRICS Trade in Current International Scenarios

Pada sesi ini Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan pandangan DPR RI mengenai pentingnya menguatkan perdagangan diantara negara-negara anggota BRICS, terutama di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu karena perang dagang dan pemberlakuan tarif perdagangan secara sepihak oleh negara tertentu, yang berdampak kepada perekonomian global. BRICS memberikan kesempatan untuk memperluas perdagangan, meningkatkan kerja sama keuangan, transfer teknologi, dan pertukaran budaya, serta pendanaan dan investasi infrastruktur. Oleh karena itu, politisi PKS tersebut juga berharap bahwa BRICS tidak hanya akan meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota tetapi juga akan lebih meningkatkan ketahanan kolektif kita terhadap tantangan global.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera saat *working session: Strengthening BRICS Trade in Current International Scenarios*. Dok: BKSAP

Namun, penting juga untuk mempromosikan lebih banyak perdagangan dan investasi intra-BRICS serta menjajaki kemungkinan penggunaan mata uang lokal dan opsi pembayaran lain yang nyaman, sebagai metode strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita, sehingga kita dapat menangani ketidakpastian ekonomi global dengan lebih baik.

Sebagai forum alternatif bagi aspirasi negara-negara berkembang, BRICS berpotensi memperkuat multilateralisme dengan mengadvokasi reformasi tata kelola global, mendorong kerja sama ekonomi, dan mendorong tatanan internasional yang lebih adil dan setara yang mewakili kepentingan negara-negara ekonomi berkembang dan negara-negara berkembang. Mendorong WTO untuk lebih transparan, inklusif, dan memprioritaskan kepentingan semua anggota secara setara. Mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam setiap diskusi perdagangan.

2. Working Session: Promoting Investment and Technology for Sustainable Development

Mempromosikan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada investasi dan transfer teknologi karena keduanya memungkinkan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga integritas lingkungan dan kesetaraan sosial. Khususnya di negara berkembang, investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, energi bersih, dan industri ramah lingkungan menawarkan tulang punggung keuangan untuk transisi hijau.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI M. Husein Fadlulloh saat *Working Session: Promoting Investment and Technology for Sustainable Development*. Dok: BKSAP

Namun, tidak semua negara memiliki cukup sumber daya atau kapasitas untuk memperoleh teknologi dan modal. Indonesia dalam hal ini, merupakan salah satu negara yang membutuhkan investasi dan alih teknologi agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Terkait hal itu, Delegasi DPR RI berpandangan bahwa BRICS dapat memberikan peluang pendanaan alternatif untuk mendukung infrastruktur penting dan proyek pembangunan berkelanjutan di negara anggota, termasuk transisi energi.

BRICS juga menyediakan peluang kolaborasi di industri pertanian, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hal ini penting bagi Indonesia karena kami memprioritaskan pencapaian swasembada pangan nasional sekaligus berkontribusi pada inisiatif penanggulangan kelaparan global. Lebih lanjut, BRICS juga menyediakan diversifikasi pasar dan peluang besar untuk kemitraan strategis dengan para anggotanya, yang meliputi Brasil di bidang pertanian, India di bidang teknologi, dan Tiongkok di bidang manufaktur. Kolaborasi ini akan memungkinkan transfer teknologi dan inovasi, yang akan meningkatkan daya saing produk nasional.

Lebih lanjut, Bank Pembangunan Baru (NDB) juga telah menyediakan pembiayaan di negara-negara berkembang terkait energi bersih dan efisiensi energi; infrastruktur sosial; dan infrastruktur digital. Dalam hal investasi dan alih teknologi, sebagai tambahan, Indonesia juga ingin mengemukakan mengenai kebijakan hilirisasi untuk dibahas dalam BRICS. Karena hilirisasi memerlukan investasi dan transfer teknologi yang signifikan untuk mempercepat proses hilir dalam mengubah sumber daya mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Indonesia juga membutuhkan fasilitas pemrosesan dan teknologi mutakhir, yang sebagian besarnya disediakan melalui investasi dan kemitraan internasional.

3. Working Session: BRICS Inter-Parliamentary Alliance for Global Health

Kerja sama kesehatan global sangat penting untuk melindungi penduduk di seluruh dunia dari risiko penyakit menular, yang dapat dengan cepat melintasi batas negara. Di dunia yang saling terhubung, wabah penyakit di mana pun dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis global, seperti yang ditunjukkan oleh pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, kerja sama kesehatan global juga memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan kesehatan, memperkuat sistem pelayanan kesehatan, dan mendorong akses yang adil terhadap sumber daya pelayanan kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian cakupan kesehatan universal dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.



Suasana Working Session: BRICS Inter-Parliamentary Alliance for Global Health. Dok: BKSAP

Sehubungan dengan hal tersebut, Delegasi Indonesia menyambut baik usulan kemitraan global untuk memberantas penyakit yang ditentukan secara sosial (SDD) dan penyakit tropis terabaikan (NTD), dengan fokus pada populasi rentan yang diinisiasi oleh BRICS di bawah kepemimpinan Brasil. Penghapusan SDD dan NTD dapat membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 1 (tanpa kemiskinan), Tujuan 2 (tanpa kelaparan), Tujuan 6 (air bersih dan sanitasi), Tujuan 10 (mengurangi ketimpangan), serta mengatasi perubahan iklim.

4. Working Session: Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence

Indonesia mengakui manfaat penggunaan AI dan bagaimana inovasinya dapat menghasilkan terobosan teknologi dan kemajuan sosial dan ekonomi bagi negara. Namun, penggunaan AI, khususnya maraknya AI generatif (GenAI) untuk teks, gambar, video, dan bahkan kode komputer, dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap penikmatan hak asasi manusia serta pembangunan budaya dan inklusif.

Delegasi DPR RI melihat untuk konteks Indonesia, ada beberapa kasus di Indonesia di mana AI semakin memicu disinformasi dan berpotensi memicu kontroversi, merusak reputasi, atau memicu ketegangan sosial. Penipuan suara AI juga telah membuat korbannya harus memverifikasi apakah penelepon benar-benar berasal dari lembaga yang kredibel. Belum lagi

potensi bias algoritma yang dapat menghambat partisipasi orang-orang tertentu, menyesatkan hasil, dan mengabaikan konteks sosial dan historis suatu konteks.

Untuk itu Delegasi DPR RI mengedepankan beberapa poin penting untuk diperhatikan dalam pemanfaatan AI serta untuk memitigasi dampak negatifnya demi penggunaan dan pemanfaatan yang lebih bertanggung jawab dan inklusif:

Pertama, Delegasi DPR RI mencatat upaya positif yang dilakukan oleh BRICS dalam diskusi AI. Forum Parlemen BRICS perlu memperkuat debat tentang AI, terutama terkait tata kelolanya, baik di tingkat nasional maupun multilateral. Norma dan tanggapan multilateral yang tersedia saat ini terkait penggunaan AI, termasuk Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI yang diadopsi pada sesi ke-41 UNESCO pada tahun 2021, dapat menjadi panduan untuk diskusi lebih lanjut.

Kedua, dalam pengembangan tata kelola AI, terdapat kebutuhan mendesak untuk menjawab, pertama dan terutama, pertanyaan etika seputar penggunaan AI. Pada tahun 2020, Indonesia merilis Strategi Nasional AI 2020-2045, dengan fokus utama pada Etika dan Kebijakan. Strategi ini menunjukkan bagaimana Indonesia menekankan urgensi etika dan ketersediaan kebijakan yang tepat sebagai hal yang fundamental bagi pengembangan AI.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera saat *Working Session: Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence*. Dok: BKSAP

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi beberapa tantangan AI, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan undang-undang ini, AI dapat dianggap sebagai agen elektronik dan harus memenuhi serta mematuhi beberapa kewajiban hukum.

Namun itu saja tidak cukup. Tata kelola AI perlu menekankan kepatuhan penuh terhadap pertimbangan etika dan hak asasi manusia di semua tahap siklus hidup dan pengembangan sistem AI serta mendorong kolaborasi multipemangku kepentingan dan internasional untuk tata kelola AI. Memang merupakan hak masing-masing negara untuk mengembangkan AI, namun perlu kerja sama dan kolaborasi untuk membentuk masa depan di mana penggunaan AI aman, dapat dipercaya, andal, tidak memihak, etis, dan bertanggung jawab juga penting.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera dan Wakil Ketua BKSAP M. Husein Fadlulloh didampingi oleh Duta Besar RI untuk Brazil Edi Yusup. **Dok: BKSAP**

Oleh karena itu Delegasi DPR RI menyerukan pengembangan teknologi AI yang inklusif di mana semua negara, terutama negara berkembang dan negara-negara terbelakang tidak tertinggal dalam revolusi digital tersebut. DPR RI juga memandang penting bagi setiap negara untuk berkolaborasi lebih lanjut dalam upaya melestarikan budaya, suku, bahasa sebagai warisan, identitas, dan pengetahuan nasional. Kemajuan teknologi AI perlu mempertimbangkan warisan, identitas, dan pengetahuan nasional ini untuk memastikan bahwa semuanya tetap dapat diakses di masa depan. Contoh tindakan tersebut adalah dalam pengembangan Model Bahasa Besar

Indonesia (LLM), di mana Indonesia berupaya mengurangi sentimen dan bias yang timbul dari penggunaan LLM asing.

Aspek ketiga yang disampaikan oleh Delegasi DPR RI adalah penggunaan AI di militer, mengingat sistem senjata mematikan dan otonom (LAWS) juga telah memanfaatkan perkembangan teknis tersebut. Masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk cara mengawasi operasional LAWS. Kita juga perlu menggarisbawahi bahwa ketika menyangkut penggunaan AI yang bertanggung jawab di militer, tidak ada pengurangan dan persyaratan terkait teknologi dan transfer pengetahuan yang dapat diterapkan.

5. Working Session: BRICS Parliamentary United for the Reform of Multilateral Peace and Security Architecture.

Pada sesi ini, Delegasi DPR RI memandang bahwa reformasi PBB dan Dewan Keamanannya merupakan suatu hal yang mendesak dan penting. Kita telah melihat banyak situasi di mana upaya untuk mengatasi ancaman dan pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional gagal. DPR RI percaya bahwa tantangan di abad ke-21 perlu ditangani dengan cara yang mencerminkan keseimbangan kekuatan realitas saat ini. Dunia tidak lagi berada di abad yang lalu. Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu adanya keseimbangan antara kekuatan seluruh anggota di Majelis Umum PBB dengan kekuatan segelintir anggota di Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ada pula kebutuhan untuk reformasi sistemik di Dewan untuk memastikan bahwa Dewan dapat lebih representatif dan aspiratif bagi setiap kawasan dan bagi negara-negara berkembang.

DPR RI menyambut baik proses negosiasi antar pemerintah saat ini yang bertujuan untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB dan menekankan bahwa kemajuannya perlu mempertimbangkan aspirasi semua pihak yang terkait. DPR RI juga menghimbau negara-negara BRICS+ untuk terus memperkuat mekanisme Sidang Umum PBB seperti Resolusi Uniting for Peace (377/V) dan Mandat Tetap untuk pembahasan Sidang Umum setiap kali Veto diberikan dalam Resolusi Dewan Keamanan (A/RES/76/262).

Terkait veto di Dewan Keamanan, Delegasi DPR RI berpendapat bahwa dalam jangka panjang, veto tidak perlu dilakukan mengingat kita perlu berpikir sebagai komunitas global dalam menangani masalah perdamaian dan keamanan yang menjadi perhatian internasional. Indonesia sependapat mengenai perlunya membatasi penggunaan veto, dengan alasan yang sah mencakup kasus-kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera saat menyampaikan pandangan DPR RI di sidang *BRICS Parliamentary Forum*. **Dok: BKSAP**

Indonesia juga menyerukan kepada Parlemen BRICS, bahwa dalam reformasi arsitektur perdamaian dan keamanan global, pencegahan dan tata kelola pascakonflik perlu diperkuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan reformasi struktural yang mendalam terhadap PBB dan lembaga multilateral terkait lainnya guna memastikan dihormatinya hukum internasional guna menjaga ketertiban, perdamaian, dan keamanan internasional.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Delegasi DPR RI telah sukses mengikuti Sidang BRICS Parliamentary Forum untuk pertama kali, sejak Indonesia secara resmi bergabung menjadi anggota tetap BRICS. Selama mengikuti sidang Delegasi DPR RI menyampaikan pandangan terhadap berbagai isu yang menjadi bahasan, serta bertukar pendapat dengan delegasi dari parlemen negara-negara lain.
2. BRICS Parliamentary Forum cukup baik dalam memposisikan diri sebagai wadah aspirasi alternatif dan penyeimbang dalam konstelasi politik dan ekonomi global yang selama ini didominasi oleh Barat. Oleh karena itu, DPR RI diharapkan dapat memanfaatkan keanggotaan di BRICS Parliamentary Forum dengan sebaik-baiknya sebagai media penyampaian kepentingan nasional Indonesia.
3. Sebagai tuan rumah pelaksanaan BRICS Parliamentary Forum, Brazil memiliki keinginan kuat untuk mendorong formalisasi dan pelembagaan BRICS. Keinginan ini tersampaikan, antara lain, melalui pidato pembukaan Sidang oleh ketua Senat Brazil. Namun demikian, keinginan ini tidak sepenuhnya disambut dengan baik oleh anggota tetap BRICS yang lain. Russia misalnya, tidak sepenuhnya setuju terhadap ide tersebut. Di sisi lain, Indonesia perlu mencermati isu ini dengan seksama karena memiliki konsekuensi terhadap Indonesia, setidaknya dari sisi finansial berupa iuran wajib.
4. Formalisasi dan pelembagaan BRICS dapat mengakibatkan organisasi ini kehilangan kekuatan utamanya sebagai wadah aspirasi alternatif dan penyeimbang politik dan ekonomi global. Sebab dengan format yang lebih resmi, dikhawatirkan BRICS akan kehilangan ciri khas fleksibilitas dan semangat inklusif yang selama ini menjadi daya tersendiri bagi negara-negara berkembang.

B. Saran

1. Mempertimbangkan posisi strategis BRICS, DPR RI disarankan untuk terlibat secara aktif di BRICS Parliamentary Forum melalui pengiriman delegasi ke setiap kegiatan-kegiatan resmi BRICS.
2. Hasil sidang yang berupa Deklarasi dapat di distribusikan dan di sosialisasikan ke Fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas-tugas keparlemenan, terutama yang terkait erat dengan politik luar negeri dan ekonomi.

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Rangkaian kegiatan dan partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI pada Forum Parlemen BRICS ke-11 yang berlangsung pada tanggal 3-5 Juni 2025 di Brasilia - Brazil menggunakan mata anggaran MAK: 2025.001030.CF.5805.AEC.001.C.524211 sebesar Rp744.404.625.00,- (Tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

B. Keterangan dan lampiran

1. Lampiran Intervensi
2. [Foto Dokumentasi](#) (link)
3. Publikasi Media (link)
 - a. [BRICS harus Ambil Peran Penting di Perdagangan Global](#)
 - b. [BRICS Harus Perkuat Komitmen terhadap Kesehatan Global](#)
 - c. [Bahas Peningkatan Hubungan Indonesia - Rusia](#)
 - d. [Brics, Buka peluang Pendanaan Alternatif](#)

C. Ucapan Terimakasih

Atas nama Delegasi BKSAP DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti pelaksanaan Forum Parlemen BRICS ke-11 yang berlangsung pada tanggal 3-5 Juni 2025 di Brasilia - Brazil.

Semoga peran BKSAP DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dan kegiatan-kegiatan BRICS di masa yang akan datang.

D. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi BKSAP DPR RI pada Forum Parlemen BRICS ke-11 pada tanggal 3-5 Juni 2025 di Brasilia - Brazil. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2025

Ketua Delegasi BKSAP DPR-RI,

ttd

Dr. Mardani Ali Sera



**Dear Mr. President/Speaker,
Dear Madam President/Speaker,**

We are honoured to invite you to participate in the 11th BRICS Parliamentary Forum, to be held in Brasília, from 3 to 5 June 2025, under the Brazilian Presidency of BRICS. The event is jointly organized by the Federal Senate and the Chamber of Deputies of Brazil and will take place at the iconic National Congress Palace, a symbol of unity and global landmark of modernist architecture.

BRICS has established itself as a key platform for cooperation and coordination among countries of the Global South. Within this framework, inter-parliamentary dialogue has become essential to fostering cooperation, promoting shared legislative perspectives, and reinforcing multilateral engagement to address global challenges.

The 11th BRICS Parliamentary Forum will provide a strategic opportunity to strengthen parliamentary ties and promote collective reflection among BRICS nations and partners. In connection with the Forum, two thematic side events will take place on 3 June, also in Brasília: the Meeting of BRICS Women Parliamentarians and the Meeting of the Chairs of the Foreign Affairs Committees of BRICS Parliaments.

Please find enclosed the Concept Note and the Practical Information Note, which provide additional details regarding the themes and logistical arrangements of the Forum.

For any additional inquiries, please contact us at brics@cn.leg.br.

We look forward to welcoming you to Brasília and are confident that your presence and valuable contributions will greatly enrich the Forum's outcomes.

With the highest consideration,



Davi Alcolumbre
President
Federal Senate of Brazil



Hugo Motta
President
Chamber of Deputies of Brazil



11th BRICS PARLIAMENTARY FORUM

Brasília, Federative Republic of Brazil, June 4-5, 2025

REV. 3 – 22 MAY 2025 – FINAL (READY FOR ADOPTION BY THE SPEAKERS AT THE CLOSING SESSION OF THE FORUM)

We, the leaders and representatives of the Parliaments of the BRICS member countries — the Federative Republic of Brazil, the People's Republic of China, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Republic of India, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Iran, the Russian Federation, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of South Africa, and the United Arab Emirates¹ — gathered in Brasília on June 4 and 5, 2025, for the 11th BRICS Parliamentary Forum (11th BRICS PF).

1

Aware of the complex and current global challenges facing our peoples and the planet, we convened under the theme “The role of BRICS Parliaments in building a more inclusive and sustainable global governance,” which is in alignment with the central theme of the Brazilian BRICS Presidency in 2025.

We reiterate our collective commitment to multilateralism, just, equitable and inclusive global governance, and the reform of international institutions to better reflect the voices and interests of developing countries. We oppose the increasing trend of unilateralism and advocate for a world order based on mutual respect, equality, and international cooperation.

We note with appreciation the contributions to inter-parliamentary dialogue made by the Meeting of BRICS Women Parliamentarians and the Meeting of Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments, held in Brasília on June 3, 2025.

We reaffirm our commitment to the spirit of BRICS, grounded in mutual respect, sovereign equality, solidarity, openness, inclusion, and consensus, principles that guide our efforts to strengthen the BRICS Strategic Partnership. We firmly believe that inter-parliamentary dialogue and cooperation are vital to advancing our shared goals and to fostering a more just and representative international order.

¹ List of countries to be adjusted, if needed, in light of actual participation at the 11th BRICS Parliamentary Forum.

REV. 3 – 22 MAY 2025 – FINAL (READY FOR ADOPTION BY SPEAKERS AT THE CLOSING SESSION OF THE FORUM)



We welcome the Republic of Indonesia as a BRICS member, as well as the Republic of Belarus, the Plurinational State of Bolivia, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Cuba, the Federal Republic of Nigeria, Malaysia, the Kingdom of Thailand, the Republic of Uganda, and the Republic of Uzbekistan as BRICS partner countries. We will facilitate consolidation of the BRICS cooperation through seamless integration of new participants into BRICS parliamentary activities. We recognize the relevance and valuable contributions of the Parliaments of BRICS partner countries to the discussions and outcomes of this Parliamentary Forum, as well as to the broader promotion of a more inclusive and equitable international order.

We reaffirm the importance of parliamentary diplomacy as a key pillar of our collective efforts, serving as a unique channel to foster mutual understanding, build trust among nations, and support the peaceful resolution of conflicts. Through inter-parliamentary dialogue, we strengthen our international cooperation and promote the values of inclusiveness, solidarity, and sustainable development.

We welcome the progress made towards deeper institutionalization of our cooperation, particularly through the Johannesburg Memorandum of Understanding (2023) and its St. Petersburg Protocol (2024), which reinforce the parliamentary dimension within BRICS.

In light of the BRICS priorities under the Brazilian Presidency (Cooperation in Global Health; Trade, Investment, and Finance; Climate Change; Governance of Artificial Intelligence; Multilateral Architecture for Peace and Security; and Institutional Development), we, as representatives of our peoples, strive to promote legislative and political solutions for a more prosperous, equitable, and sustainable future.

In accordance with the above, we adopt by consensus the following:

JOINT DECLARATION FROM THE
11th BRICS PARLIAMENTARY FORUM

REV. 3 – 22 MAY 2025 – FINAL (READY FOR ADOPTION BY SPEAKERS AT THE CLOSING SESSION OF THE FORUM)



I. Parliaments for Global Health

1. In light of the increasing relevance of the interface between sustainable development and global health issues, we will work together to strengthen international health cooperation, in an inclusive, equity-based, result-oriented manner, with due respect to the sovereignty and interests of all countries.
2. Taking note of the adoption by the 78th World Health Assembly, on May 20th 2025, of the WHO Pandemic Agreement, we encourage joint efforts towards the substantial improvement of timely, equitable and unhindered access to quality essential health services and safe, effective, quality and affordable essential medicines, vaccines and relevant technologies for all. Furthermore, we will promote actions specifically aimed at addressing neglected tropical diseases and socially determined diseases, which disproportionately impact the Global South, antimicrobial resistance (AMR), as well as non-communicable diseases.
3. We support the strengthening of parliamentary measures to support investments in digital health to expand access to health services in remote or underserved areas, as well as to promote the ethical and responsible integration of artificial intelligence into the health sector.
4. We recommend that the Parliaments of the BRICS countries intensify inter-parliamentary cooperation, particularly in monitoring and evaluating health policies and legislation, in line with the health-related United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Agenda. They should also foster strategic partnerships among universities, public institutions, and the Health Industrial Economic Complex to promote research and development (R&D), and scientific and technological exchanges for the joint development of new products and therapies. The BRICS Parliamentary Forum reaffirms its commitment to actively supporting legislative initiatives that ensure health sovereignty, equity, sustainability, and technological



innovation, recognizing that collective action and solidarity are essential to addressing global health challenges.

II. Parliaments for Inclusive Trade, Investment, and Finance

5. We emphasize the need to improve the international financial, trading, and monetary systems by enhancing coordination to reform the governance of multilateral institutions underpinning these systems. This includes strengthening the Global Financial Safety Net and ensuring that international institutions more accurately reflect the current reality of the global economy, particularly given the growing relevance of countries from the Global South. We therefore encourage the Parliaments of the BRICS countries to support efforts to reform the Bretton Woods institutions, so that their governance is representative of and reflective of the interests and developmental imperatives of emerging markets and developing countries (EMDCs), including Least Developed Countries (LDCs). This entails revising shareholdings in the World Bank, realigning quotas in the International Monetary Fund (IMF), and increasing EMDC representation in leadership positions of international financial institutions.
6. We reaffirm our commitment to a multilateral trading system that is rules-based, open, inclusive, fair, transparent, consensus-driven and anchored in international law. We support ongoing efforts to strengthen the World Trade Organization (WTO) while reaffirming the provisions of special and differential treatment for developing countries and LDCs as an integral part of the WTO and its agreements to ensure equitable growth for all.
7. Concerned about the rise of unjustified unilateral protectionist measures and their ramifications on the global economy, we stress the importance of avoiding unilateral measures that could adversely affect global trade and economic development, and encourage dialogue and cooperation in accordance with the UN Charter and WTO rules. We underline that multilateral decision-making, based on consensus and mutual respect, is key to promoting global economic stability and prosperity.



8. We encourage the resolution of trade disputes through inclusive multilateral mechanisms and highlight the importance of dialogue to avoid escalation and ensure equitable development opportunities.
9. We reiterate our concern about the use of unilateral coercive measures, including illegal sanctions, which are incompatible with the principles of the UN Charter and international law and produce negative effects on economic growth, trade, energy, health and food security notably in the Global South.
10. We underscore the importance of the enhanced use of local currencies in trade and financial settlements between BRICS countries and their trade partners. We encourage our competent authorities to continue consideration of the issue of local currencies, payment instruments and platforms.
11. We consider it necessary to expand various BRICS instruments. Recognizing the importance of access to infrastructure financing, we highlight the vital role played by the New Development Bank (NDB). We also encourage NDB's further membership expansion and expedited consideration of applications of BRICS countries. Regarding international financial stability, we underscore the importance of the Contingent Reserve Arrangement (CRA) in mitigating balance of payments pressures.

III. Parliaments for Climate Action and Just Transitions

12. As we approach the 30th Conference of the Parties (COP 30) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), to be held in Belém do Pará, Brazil, in November, and recognizing the urgency of addressing climate change, we encourage countries to intensify their efforts, through dialogue and international cooperation, to raise their ambitions in attaining the goals and targets of the UNFCCC and its Paris Agreement, achieve just transition pathways while reflecting equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in light of different national circumstances.



13. We urge the developed countries to provide adequate and sufficient means of implementation to enable developing countries to advance their climate actions, including robust concessional climate finance, capacity building, and technology transfer, without placing additional burdens on developing countries, ensuring they are accessible, predictable and aligned with developing countries' needs.

14. Aware of the fundamental role of parliaments in advancing legislation and policies aligned with the principles of the UNFCCC and its Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development, we will seek to deepen inter-parliamentary collaboration to share best practices and develop joint strategies for cooperation on mitigation and adaptation efforts, carbon accounting standardization, the development of fair and transparent carbon markets and technology development and transfer, as appropriate.

15. We recognize the essential nature of a balanced environment for the well-being of present and future generations, and we will intensify legislative efforts to implement actions aimed at restoring ecosystems, conserving biodiversity, conserving water resources, reducing plastic pollution, strengthening disaster-resilient infrastructure, and identifying solutions to combat desertification, sand and dust storms, soil degradation, and drought, among other environmental challenges.

16. Acknowledging the transformative power of the economy, we commit to promoting and developing policies that adequately assess climate and environmental impacts to ensure just transitions, stimulate low-emission economic transformation while considering the three, inseparable dimensions of sustainable development.

17. We acknowledge that the impacts of climate change and natural disasters disproportionately affect certain populations, including women, children, the elderly, refugees, migrants, persons with disabilities, traditional local communities and indigenous peoples, and residents of low-income regions. People in vulnerable situations should be included and considered in policy planning and decision-making processes concerning the response to such events and their adverse effects. In this



process, we emphasize the importance of a just transition in labor forces, ensuring that workers are supported through skilling-reskilling-upskilling social protections, and inclusive policies that create sustainable and decent jobs in emerging sustainable industries.

IV. Parliaments for Governance of Artificial Intelligence (AI)

18. We recognize that, notwithstanding ethical and legal concerns, the rapid advancement of artificial intelligence presents significant opportunities for sustainable development, the reduction of inequalities, and balanced economic growth. In this regard, we agree that the Parliaments of the BRICS countries should, in exercising their oversight and law-making mandates, play an integral part in formulating national legal and regulatory frameworks and policies that ensure transparency and ethics in the safe use of AI, aiming to mitigate biases, and uphold respect for cultural and linguistic diversity and human rights. In upholding the rights and interests of humanity, we stress the importance of human-centric, development-oriented, inclusive, reliable, safe, secure, trustworthy, unbiased, ethical artificial intelligence for the common good and for all, with clearly assigned responsibilities to the companies developing these technologies and compliance with national legislations. We look forward to BRICS cooperation to help developing countries strengthen AI capacity building, taking into consideration the UN General Assembly Resolution A/RES/78/311 -- Enhancing International Cooperation on Capacity-building of Artificial Intelligence. Furthermore, we call for an increased global collaboration and the financing of AI projects in developing countries, with the UN at its core.

19. We emphasize the need to strengthen the digital sovereignty of BRICS member countries by protecting data privacy and security, as well as by building resilient national technological ecosystems. To this end, we highlight the strategic role of partnerships among governments, the private sector, and academia in advancing innovation in artificial intelligence and in developing enabling technologies. We encourage the sharing of best practices that ensure privacy, data sovereignty, security



in the use of information and communication technologies, and the protection of intellectual property, in accordance with national legislation and regulatory frameworks.

20. We emphasize the importance of ensuring inclusive and equitable access to artificial intelligence technologies for all countries. The benefits of AI should be shared in a manner that promotes innovation, bridges the digital divide, and supports sustainable development. We encourage international cooperation to ensure that all countries can meaningfully participate in the development, governance, and ethical use of AI, guided by principles of mutual respect, fairness, non-politicization and shared progress.

V. Parliaments for a Renewed International Peace and Security Architecture

21. As we mark the 80th anniversary of the founding of the UN, we reaffirm our commitment to multilateralism, international law, and the UN Charter as the foundation of a peaceful, stable, and prosperous international order, anchored in the universally recognized principles of international law.

22. We stress the urgency of reforming the current international peace and security architecture, which necessarily requires the strengthening of multilateralism, and support a comprehensive reform of the United Nations—including its Security Council. This reform should make it more just, equitable, democratic, representative, effective, and efficient, better reflecting contemporary realities and the needs of the international community.

23. We believe that lasting security can only be achieved through genuine dialogue, mutual respect, and equitable participation of all nations in decision-making processes.

24. We advocate for the improvement of mechanisms to peacefully resolve international conflicts and disputes, ensuring greater participation by countries of the Global South in dialogues and peace processes. Rebuilding mutual trust and understanding among nations, through the effective inclusion of these actors, can significantly contribute to



this goal. We will seek to pursue these objectives individually through our respective Parliaments and collectively through inter-parliamentary cooperation.

25. We express strong condemnation of any acts of terrorism as criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. We condemn in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22 April 2025, during which at least 26 people were killed and many more injured. We reaffirm our commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including the cross-border movement of terrorists, terrorism financing and safe havens. We reiterate that terrorism should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group and that all those involved in terrorist activities and their support must be held accountable and brought to justice in accordance with relevant national and international law. We urge to ensure zero tolerance for terrorism, and reject double standards in countering terrorism. We emphasize the primary responsibility of States in combating terrorism and that global efforts to prevent and counter terrorist threats must fully comply with their obligations under international law, including the Charter of the United Nations, in particular the purposes and principles thereof, and relevant international conventions and protocols, in particular international human rights law, international refugee law and international humanitarian law, as applicable. We welcome the activities of the BRICS Counter-Terrorism Working Group and its five Subgroups based upon the BRICS Counter-Terrorism Strategy and the BRICS Counter-Terrorism Action Plan. We also look forward to further deepening counter-terrorism cooperation. We call for an expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism in the UN framework. We call for concerted actions against all UN designated terrorist and terrorist entities.

VI. Parliaments for the Institutional Strengthening of BRICS

26. We recognize that the recent expansion of BRICS requires a continuous effort to improve our working methods and to strengthen the cohesion of the group, including within the parliamentary sphere. We commit to continuing the implementation of the



Memorandum of Understanding (MoU) of the BRICS Parliamentary Forum and its Protocol in order to consolidate our cooperation.

27. We encourage the strengthening and diversification of formats for inter-parliamentary interaction, including thematic meetings, forums for young parliamentarians, and meetings of International Affairs Committee Chairpersons, to deepen the exchange of experiences and best legislative practices. In particular, we reaffirm our commitment to ensuring the continuity of the BRICS Women Parliamentarians Meeting, emphasizing the importance of institutionalizing it as a regular annual event.

10

28. We encourage Parliaments of the BRICS countries to monitor, as appropriate, the implementation of the commitments made by the BRICS Parliamentary Forum.

29. We support the promotion of greater transparency and public access to the activities and documents of the BRICS Parliamentary Forum, including through the creation of special sections of the national Parliaments' websites dedicated to inter-parliamentary relations between the BRICS countries. This will support the goal of improving accountability to our citizens and enhancing the contribution of the parliamentary dimension to the broader objectives of BRICS.

30. We recognize that training and capacity building are essential to promoting more effective parliamentary cooperation and, therefore, reaffirm our support for initiatives that contribute to developing the skills, knowledge, and capabilities of parliamentarians and their technical and legislative advisors, to address the common challenges faced by member countries, including through the exchange of experiences and best practices among BRICS Parliaments.

31. We recognize the importance of deepening institutional engagement between the BRICS Parliamentary Forum and regional and international parliamentary organizations. Strengthening these ties will promote greater awareness of the Forum's goals, mechanisms, and contributions to global governance. Such engagement is



essential for enhancing trust in the BRICS parliamentary dimension as a platform committed to dialogue, multilateralism, and inclusive development.

32. We emphasize that the long-term sustainability and effectiveness of the BRICS partnership rests upon strong people-to-people relations. In this regard, we encourage greater cultural, educational, and sports exchanges among BRICS countries. We also highlight the importance of organizing regular BRICS sports tournaments as a means to foster friendship, solidarity, and mutual understanding among our societies, especially among the youth. Enhancing public awareness of BRICS values and achievements will contribute to greater social cohesion and ownership of the BRICS vision among our peoples.

33. Consistent with our previous resolutions, a formalized BRICS Parliamentary Forum would serve to strengthen and amplify the BRICS parliamentary dimension.

Conclusion

34. We, the participants of the 11th BRICS Parliamentary Forum, express our sincere gratitude to the Chamber of Deputies, the Federal Senate, and the people of the Federative Republic of Brazil for their hospitality and dedication in organizing this Forum in Brasília.

35. We request the Presidency of the BRICS Parliamentary Forum to forward this Joint Declaration to our respective Heads of State and Government and to the Brazilian Presidency of BRICS, as a contribution to the XVII BRICS Leaders' Summit, to be held in Rio de Janeiro on July 6 and 7, 2025.

36. We commit to continuing our joint work through parliamentary diplomacy and inter-parliamentary cooperation, and look forward to reconvening at this Parliamentary Forum under the Presidency of India in 2026, to whom we extend our support and convey our best wishes for success.



11th BRICS Parliamentary Forum

Brasília, 3 - 5 June 2025

Provisional Programme

Tuesday 3 June 2025		Location
Meeting of BRICS Women Parliamentarians		
10:30 – 11:00	Opening ceremony of the Meeting of BRICS Women Parliamentarians	Committee meeting room 2 Chamber of Deputies
11:00 - 12:00	<u>1st Working session of Meeting of BRICS Women Parliamentarians –</u> <i>Women in the Age of Artificial Intelligence: Between the Protection of Rights and Female Inclusion in the Digital Economy</i>	Committee meeting room 2 Chamber of Deputies
12:00 - 14:00	Working lunch	Chamber of Deputies Restaurant
14:00 - 15:00	<u>2nd Working Session of Meeting of BRICS Women Parliamentarians –</u> <i>Empowering Women to Face the Climate Crisis: BRICS Perspectives</i>	Committee meeting room 2 Chamber of Deputies
15:00 - 15:40	<u>3rd Working Session of Meeting of BRICS Women Parliamentarians –</u> <i>Building the future: Women Parliamentarians and the BRICS 2025 Agenda</i>	Committee meeting room 2 Chamber of Deputies
15:40 - 15:50	Coffee break	
15:50 - 16:15	Closing session of the Meeting of BRICS Women Parliamentarians	Committee meeting room 2 Chamber of Deputies
16:15 – 17:00	Exchange with the NDB: women as agents and beneficiaries of financing	Committee meeting room 2 Chamber of Deputies
17:00 - 19:00	Welcome cocktail for the 11 th BRICS Parliamentary Forum	Black Hall of the National Congress



Tuesday 3 June 2025		Location
Meeting of the Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments		
10:30 – 11:00	Opening ceremony of the Meeting of the Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments	Committee meeting room 1 Chamber of Deputies
11:00 - 12:00	<u>1st Working session of Meeting of the Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments</u> – <i>Strengthening BRICS Trade in the Current International Scenario</i>	Committee meeting room 1 Chamber of Deputies
12:00 - 14:00	Working lunch	Chamber of Deputies Restaurant
14:00 - 15:00	<u>2nd Working session of Meeting of the Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments</u> – <i>Promoting Investment and Technology Transfer for Sustainable Development</i>	Committee meeting room 1 Chamber of Deputies
15:00 - 16:00	<u>3rd Working session of Meeting of the Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments</u> – <i>Financial Instruments for a More Resilient and Sustainable BRICS</i>	Committee meeting room 1 Chamber of Deputies
16:00 - 16:10	Coffee break	
16:10 - 16:40	Closing session of the Meeting of the Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments	Committee meeting room 1 Chamber of Deputies
17:00 - 19:00	Welcome cocktail for the 11 th BRICS Parliamentary Forum	Black Hall of the National Congress



Wednesday 4 June 2025		Location
11th BRICS Parliamentary Forum		
9:00	Arrival of delegations	
10:00	Official photo	Black Hall of the National Congress
10:30 - 12:00	Opening ceremony of the 11 th BRICS Parliamentary Forum	Plenary of the Federal Senate
12:00 - 14:00	Working lunch	Chamber of Deputies Restaurant
14:00 - 15:30	<u>1st Working session:</u> <i>BRICS Inter-Parliamentary Alliance for Global Health</i>	Plenary of the Federal Senate
15:30 - 17:00	<u>2nd Working Session:</u> <i>BRICS Parliamentary Action in Search of New Paths for Economic Development</i>	Plenary of the Federal Senate
19:30 - 22:00	Official dinner of the 11th BRICS Parliamentary Forum	Itamaraty Palace

Thursday 5 June 2025		Location
09:00 - 10:30	<u>3rd Working Session:</u> <i>BRICS Inter-Parliamentary Dialogue on Climate and Sustainability</i>	Plenary of the Federal Senate
10:30 - 12:00	<u>4th Working Session:</u> <i>Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence</i>	Plenary of the Federal Senate
12:00 - 14:00	Working lunch	Chamber of Deputies Restaurant
14:00 - 15:30	<u>5th Working Session:</u> <i>BRICS Parliaments United for the Reform of the Multilateral Peace and Security Architecture</i>	Plenary of the Federal Senate
15:30 - 17:00	<u>6th Working Session:</u> <i>Towards Stronger and More Durable BRICS Inter-Parliamentary Cooperation</i>	Plenary of the Federal Senate
17:00 - 18:00	Closing session <i>Adoption of Final document and closing remarks</i>	Plenary of the Federal Senate



Plenary of the Chamber of Deputies (Brazil)

10.30 – 12.00

Thursday, 5 June 2025

5th working session: ***BRICS parliaments United for the Reform of the Multilateral Peace and Security Architecture***

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Distinguished Panelists,
Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

Thank you for giving me the floor.

- 🎤 Indonesia believes that there is a high need to reform the global peace and security architecture, in particular the UN and its Security Council. We have seen multiple situations where efforts to address threats and breaches to international peace and security failed.
- 🎤 We believe that challenges in the 21st century need to be addressed in a manner which reflect the balance of power of current realities. The world is not in the past century no longer.
- 🎤 Indonesia believes that there is a need to balance the power of the whole members rest in the UN General Assembly with the power of the few in the UN Security Council. Moreover, there is also a need for a systemic reform in the Council to ensure that it can be more representative and aspirational for each region and for the developing world.
- 🎤 We welcome the current process of intergovernmental negotiation aimed at reforming the UN Security Council and stress that its progress needs to take into account the aspirations of all parties concerned.
- 🎤 In addition, the Pact for the Future adopted at the Summit for the Future in 2024 can serve as a guiding document for all Member States on the principles contained with regards to the Security Council reform for a more representative, inclusive, transparent, efficient, effective, democratic and accountable.
- 🎤 The Indonesian House also calls upon BRICS+ countries to continuously strengthen the UN GA mechanism such as the Uniting for Peace Resolution



(377/V) and the Standing Mandate for a GA debate whenever a Veto is Cast in the Security Council Resolution (A/RES/76/262).

- With regards to the veto in the Security Council, Indonesia believes that in the long run, there needs to be no veto given that we need to think as global community when addressing a matter of peace and security international concern. Indonesia echoes the view regarding the need to limit veto use, where legitimate reasons for doing so should include cases of genocide, crimes against humanity and war crimes.

Delegates

- Indonesia also calls upon BRICS Parliament, that in the reform of global peace and security architecture, prevention and post-conflict governance needs to be strengthened. To that end, a deep structural reform of the UN and other relevant multilateral institutions is required to ensure that international laws to maintain order and international peace and security is respected.

Thank you.



Plenary of the Chamber of Deputies (Brazil)

10.30 – 12.00

Thursday, 5 June 2025

4th working session: Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Distinguished Panelists,
Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

Thank you for giving me the floor.

- Indonesia acknowledges the benefit of using AI and how its innovation could lead to technological breakthroughs and social and economic advancements for the country.
- However, the use of AI, particularly the rise of generative AI (GenAI) for text, images, video, and even computer code may pose a huge risk to human rights enjoyment and cultural and inclusive development.
- There have been cases in Indonesia where AI further drives disinformation and may potentially spark controversy, damage reputation, or ignite social tensions. AI voice scams have also lingered its victims which try to verify whether the caller is really from a credible institution.
- Not to mention the potential of algorithm biases that can hamper certain people's participation, misguide outcomes, and eliminate a context's societal and historical backgrounds.
- Indonesia deems the following key points as critical to harness the benefit of AI and address its negative impacts for a more responsible and inclusive AI:
- *First*, we take note the positive efforts made by BRICS in the discussion of AI. BRICS Parliamentary Forum needs to strengthen the discussion on AI especially with regards to its governance both at the national and multilateral arena. The currently available multilateral norms and responses regarding the use of AI, including the UNESCO Recommendation on the Ethics of AI adopted during the UNESCO 41st session in 2021 can serve as a guidance for further discussion.



- *Second*, in the development of AI governance, there is an urgency to address first and foremost, the ethical questions on the use of AI. In 2020 Indonesia released the National Strategy on AI 2020-2045 where the first area focus is on Ethics and Policy. It showcases how Indonesia emphasizes the urgency of ethics and the availability of appropriate policies as fundamental to AI development.
- In Indonesia, several legislations are in place to tackle some AI challenges, such as the Electronic Information and Transactions Law and Personal Data Protection Law, whereby under the existing law, AI can be considered an electronic agent and should meet and comply with several law obligations.
- But that is not enough. AI governance needs to emphasize the full compliance of ethical and human rights considerations in all stages of the AI system lifecycle and development as well as encourage multi stakeholders and international collaboration for AI governance.
- We acknowledge the respective rights of each country to develop AI, yet we also believe that cooperation and collaboration to shape a future where AI use is safe, trustworthy, reliable, unbiased, ethical and responsible are also critical.
- We call therefore for an inclusive AI technological development where all countries, especially developing countries and the LDCs are not left behind in such digital revolution.
- The Indonesian House also deem critical for each country to collaborate further in the efforts to preserve its cultural, ethnicity, language as the national heritage, identity and knowledge.
- AI technological advancement needs to factor these national heritage, identity and knowledge to ensure that they remain accessible in the future. An example of such measures is in the development of Indonesian Large Language Model (LLM), where Indonesia is trying to reduce sentiments and biases arising from the use of foreign LLM.

Delegates

- The *third* aspect that we would like to highlight is on the use of AI in military, given that the lethal and autonomous weapons systems (LAWS) have also taken the advantage of such technical development.
- Challenges remain in its implementation, including ways to oversee the operation of LAWS. We need to also underline that when it comes to the responsible use of



AI in the military no reduction and conditionality regarding technology and knowledge transfer can be applied.

- Delegates, I wish to highlight a statement issued by the Center for AI Safety signed by more than 350 scientists, business executives, and public figures: *"Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war."*
- The statement reminds us that it is high time to discuss the use of AI and its benefit, the scale of its impacts, and the adverse effect it poses to humanity.

Thank you.



11th BRICS
Parliamentary Forum



Committee Meeting Room Chamber of Deputies (Brazil)

14.00 – 15.30

Tuesday, 3 June 2025

2nd Working Session of Meeting of the Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments: **Promoting Investment and Technology Transfer for Sustainable Development**

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

Thank you for the opportunity to deliver the Indonesian House perspective on today's discussion topic.

- Promoting sustainable development depends critically on investment and technology transfer since they enable economic growth while maintaining environmental integrity and social equality. Particularly in developing countries, investment in sustainable infrastructure, clean energy, and environmentally friendly industries offers the financial backbone for green transitions.
- Not every country, however, has enough resources or capacity to acquire technology and capital. Indonesia in this regard, is one of those that requires investment and technology transfer in order to be able to fully achieve sustainable development.
- On that note, Indonesian House is of the view that BRICS can provides an opportunity for alternative funding to support critical infrastructure and sustainable development projects in member countries, including the energy transition.
- It also provides collaborative opportunities in the agriculture industry, with the goal of increasing productivity and efficiency. This is significant for Indonesia since we prioritize achieving national food self-sufficiency while contributing to global hunger relief initiatives.
- BRICS also provides market diversification and huge opportunities for strategic partnership with its members, which include Brazil in agriculture, India in technology, and China in manufacturing. These collaborations would enable technological transfer and innovation, boosting the competitiveness of national products.



- Further, the New Development Bank (NDB), has also been providing financing in developing countries related to clean energy and energy efficiency; social infrastructure; and digital infrastructure.

Delegates,

- In terms of investment and technology transfer, as an addition, Indonesia is also keen to bring up concerns regarding our downstream policy for discussion within BRICS. As it requires significant investment and technology transfer to speed up the downstream process of transforming raw resources into finished or semi-finished products. It also needs processing facilities and cutting-edge technology, the majority of which is provided through international investment and partnership.
- We also encourage BRICS to take steps on the issues of critical minerals and sustainable vegetable oil.
 - On critical minerals, we need to (i) improve our capacity for diversification, stability, and equitable access to these resources; (ii) support energy transformation, including electric vehicles (EVs), through collaborative investment and research; (iii) collaborate on mineral processing, trade, and technological innovation; and (iv) empower developing countries to advance their own mineral value chains.
 - On sustainable vegetable oil, we take a broad perspective of its sustainability, including its real advantages for small communities, and (ii) take joint steps to address discriminatory trade practices against palm oil. A coordinated joint step is essential in promoting fair trade practices that recognize the contributions of palm oil producers while ensuring that sustainability remains at the forefront of our initiatives.

Thank you.



11th BRICS
Parliamentary Forum



Committee Meeting Room Chamber of Deputies (Brazil)

10.30 – 12.00

Tuesday, 3 June 2025

1st Working Session of Meeting of the Chairs of the Committees on International Affairs of BRICS Parliaments: **Strengthening BRICS Trade in Current International Scenarios**

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

Thank you for giving me the floor.

- Maintaining resilience and pursuing long-term economic growth have become very challenging in the middle of today's global trade environment marked by geopolitical tensions, supply chain vulnerabilities, unilateral policies, climate disruptions, regulatory issues, and digital risk. We must be more adaptable while giving infrastructure top priority along with technological development.
- At BRICS, we have the chance to expand trade, enhance financial cooperation, technology transfer, and cultural exchange, as well as infrastructure funding and investment. Hence, it will hopefully not only improve economic cooperation among member nations but will also further increase our collective resilience to global challenges.
- However, it is also important for us to promote more intra-BRICS trade and investment and look into the possibility of using local currencies and other convenient payment options, as a strategic method to strengthen our economic resilience, so that we can better handle global economic uncertainty.

Delegates,

- Aside from expanding intra-trade, BRICS may improve its standing in today's global trade order by fully supporting the WTO reform agenda.
- As an alternative forum for developing countries aspirations, BRICS has the potential to strengthen multilateralism by advocating global governance reforms, fostering economic cooperation, and promoting a more equitable and just



11th BRICS
Parliamentary Forum



international order that represents the interests of emerging economies and developing countries.

- Encouraging the WTO to be more transparent, inclusive and prioritize the interests of all members equally. Taking into account the interest of developing countries in every discussion on trade.
- To conclude, BRICS can considerably strengthen its position in today's global economic scene by increasing intra-trade cooperation, boosting financial integration and actively engaging in every effort to create a more just global trade order.

Thank you.



Plenary of the Federal Senate (Brazil)

14.00 – 15.30

Wednesday, 4 June 2025

1st Working Session: **BRICS Interparliamentary Alliance for Global Health**

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

*Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,*

Thank you for the opportunity to share views on our today's discussion on global health.

- Global health cooperation is critical for protecting populations worldwide from infectious disease risks, which can quickly cross-national borders. In our interconnected world, a disease outbreak anywhere can quickly escalate into a global crisis, as demonstrated by the COVID-19 pandemic.
- Furthermore, global health cooperation also has an important role in resolving health disparities, strengthening health-care systems, and encouraging equitable access to healthcare resources, all of which contribute to achieving universal health coverage and the broader goals of sustainable development.
- On that note, we welcome the proposal of global partnership to eliminate socially determined diseases (SDDs) and neglected tropical diseases (NTDs), focusing on vulnerable populations initiated by BRICS under Brazil's leadership.
- The elimination of SDD and NTD can help achieve the Sustainable Development Goals, especially Goal 1 (no poverty), Goal 2 (no hunger), Goal 6 (clean water and sanitation), Goal 10 (reduced inequality), as well as addressing climate change.

Delegates,

- To strengthen BRICS role in global health cooperation, Indonesia encourage BRICS to reinforce its commitment to global health security, through capacity building, medical resource sharing, and creating equal access to vaccines, particularly in the Global South.



11th BRICS
Parliamentary Forum



- Furthermore, given the United States' current withdrawal from the World Health Organization, it is important for BRICS to assume main role in shaping global health governance to make it more inclusive, responsive, and reflective.

Thank you.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral

Jl. Taman Pejambon No.6
Jakarta Pusat 10110
E. ditsosbudoinb@kemlu.go.id

T. (6221) 344 1508
F. (6221) 384 9410
W. kemlu.go.id

Jakarta, 8 Mei 2025

Nomor : 01539/TI/05/2025/51/07
Sifat : SANGAT SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Bahan Masukan untuk Sidang 11th
BRICS Parliamentary Forum, Brasilia, 3 – 5 Juni
2025

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal DPR RI
u.p. Kepala Biro KSAP
di

Jakarta

Merujuk Sekretaris Jenderal DPR RI No: B/5145/KS/01.01/04/2025 dan perihal pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahan masukan untuk Sidang 11th BRICS Parliamentary Forum, Brasilia, 3 – 5 Juni 2025.

Bahan masukan disusun berdasarkan enam fokus utama Parliamentary Forum di bawah Presidensi Brasil, yaitu kesehatan global, perdagangan dan keuangan, perubahan iklim, tata kelola kecerdasan buatan, arsitektur perdamaian dan keamanan multilateral, serta penguatan kelembagaan parlemen.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral



Penny D. Herasati

Tembusan:

1. Yth. Menteri Luar Negeri (sebagai laporan)
2. Yth. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga

Daftar Isi

A. Co-operation in Global Health	2
B. Trade, Investment and Finance.....	3
C. Climate Change.....	4
Perkembangan Kebijakan Indonesia.....	6
Saran Posisi Indonesia untuk Perubahan Iklim	7
Tambahan Informasi Mundurnya AS dari <i>Paris Agreement</i>	8
D. Artificial Intelligence (AI) Governance.....	10
Saran Posisi untuk Artificial Intelligence (AI) Governance	12
E. Multilateral Peace and Security Architecture.....	13
Isu Reformasi DK PBB.....	13
Isu Palestina	15
F. Institutional Development	18
Penguatan Multilateral Development Bank	18
Reformasi IMF-World Bank.....	19
Perpajakan internasional di forum multilateral.....	19
Intensi Indonesia bergabung ke <i>New Development Bank</i>	19
Posisi Indonesia.....	20

**BAHAN MASUKAN
SIDANG 11TH BRICS PARLIAMENTARY FORUM
BRASILIA, BRAZIL, 3 – 5 JUNI 2025**

A. Co-operation in Global Health

1. Kerja sama kesehatan global menjadi isu penting di BRICS yang mencakup sekitar 48,5% populasi dunia dan 39% PDB global. Di bawah Ketetuaan Brazil, BRICS mendorong kemitraan global untuk menghapuskan *socially determined diseases and infections* (SDD) dan *neglected tropical diseases* (NTD).
2. SDD terkait erat dengan kemiskinan, ketimpangan, dan kondisi hidup yang tidak layak. Kondisi tersebut merupakan hambatan bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan, kestabilan ekonomi, dan kesejahteraan global. Sedangkan NTD ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan mencakup 20 penyakit termasuk di antaranya demam berdarah dengue, rabies, chikungunya, dan kusta.
3. Penghapusan SDD dan NTD dapat membantu tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama TPB 1 (tanpa kemiskinan), TPB 2 (tanpa kelaparan), TPB 6 (air bersih dan sanitasi layak), TPB 10 (berkurangnya kesenjangan), dan TPB 13 (penanganan perubahan iklim). Ketetuaan Brazil mendorong formalisasi *BRICS Alliance for the Elimination of Socially-Determined Diseases and Neglected Tropical Diseases*.
4. Kontribusi Indonesia pada diplomasi kesehatan dalam kerangka multilateral telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk menentukan dan mengawal kebijakan kesehatan global. Pada masa pandemi COVID-19, peran Indonesia dalam memperkuat arsitektur kesehatan global antara lain:
 - a. Menteri Luar Negeri RI menjadi *co-chair* dari COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (COVAX AMC EG) pada 2021–2023. COVAX Facility berhasil mengalokasikan 1,97 miliar dosis vaksin COVID-19 ke 146 negara, termasuk 110 juta dosis vaksin ke Indonesia.
 - b. Pembentukan *Pandemic Fund* pada Presidensi G20 Indonesia 2022 yang telah berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar USD 1,941 miliar dari 24 negara, termasuk Indonesia, dan tiga yayasan.
 - c. Indonesia melalui PT Bio Farma terpilih menjadi penerima teknologi vaksin mRNA dari WHO pada 2022. Salah satu keluaran dari capaian ini adalah peluncuran vaksin COVID-19 IndoVac sebagai hasil kolaborasi Bio Farma dengan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat. PT Bio Farma juga telah menjadi *OIC Centre of Excellence on Vaccines and Biotechnology*.
 - d. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam negosiasi Amandemen *International Health Regulations* (IHR) 2005 sejak tahun 2022. Amandemen ini telah berhasil diadopsi pada *World Health Assembly* (WHA) ke-77 pada 2024.
 - e. Indonesia juga terlibat dalam pembahasan *WHO Pandemic Agreement* sejak tahun 2021. Setelah pembahasan selama 3 tahun yang mencakup 13 pertemuan formal dan sejumlah negosiasi informal, proposal *WHO Pandemic Agreement* telah berhasil disusun pada 16 April 2025. Proposal tersebut selanjutnya diserahkan kepada WHA untuk dibahas pada bulan Mei 2025.
5. Indonesia mendorong BRICS untuk: (i) penguatan komitmen terhadap ketahanan kesehatan global antara lain melalui pembangunan kapasitas, *medical-resource sharing*, serta akses vaksin yang setara terutama di Selatan Global; dan (ii) megambil kendali pembentukan tata kelola kesehatan global agar lebih inklusif, responsive, dan

reflektif, mengingat Amerika Serikat saat ini sedang dalam proses penarikan diri dari World Health Organization (WHO).

B. Trade, Investment and Finance

6. Terkait isu *trade, investment, and finance*, Ketetapan Brazil mendorong agar kerja sama BRICS dapat difokuskan pada isu non-tarif terutama dalam hal fasilitasi perdagangan dan investasi intra-BRICS. Brazil juga mendorong agar penggunaan mata uang lokal dan metode pembayaran yang efisien dapat menjadi prioritas.
7. Pada tingkat teknis, BRICS memiliki mekanisme pertemuan *Contact Group on Economic and Trade Issues* (CGETI). CGETI dibentuk tahun 2011 untuk memberikan rekomendasi ekonomi dan perdagangan kepada *BRICS Trade Ministers*. Dalam pertemuan CGETI pada 24 – 25 Maret 2025 di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri Brazil, dibahas tiga isu prioritas: (i) negosiasi *BRICS Economic Partnership Strategy for 2026-2030*; (ii) pentingnya sistem perdagangan multilateral, dengan *World Trade Organization* (WTO)
8. Pada 25 Maret 2025, Indonesia telah memutuskan untuk menjadi anggota *New Development Bank* (NDB), bank pembangunan yang diinisiasi oleh BRICS. Indonesia dan NDB memiliki sejumlah kesesuaian tujuan. NDB dapat mendukung pembangunan yang mendorong terciptanya lapangan kerja, termasuk investasi pada sains, Pendidikan, teknologi, dan inovasi. NDB juga telah mengantongi 77 proyek strategis nasional dalam jangka menengah dan panjang yang diusulkan Indonesia untuk percepatan transformasi.
9. NDB telah melakukan pendanaan di negara berkembang terkait energi bersih dan efisiensi energi; infrastruktur sosial; serta infrastruktur digital. NDB bersama dengan sejumlah Bank Pembangunan Multilateral (MDB) lainnya memiliki komitmen untuk pendanaan iklim sebagai kesepakatan pada KTT Aksi Iklim PBB 2019. Dalam Laporan Bersama Pendanaan Iklim MDB 2023, Indonesia termasuk negara penerima dana yang cenderung naik dari USD 674 juta pada 2015 menjadi USD 3,9 miliar pada 2023.
10. Indonesia juga mendorong BRICS agar dapat mendukung reformasi WTO. Hal tersebut telah disampaikan dalam *BRICS Foreign Ministers Meeting* (FMM), Rio de Janeiro, Brazil, 28 – 29 April 2025. Reformasi WTO yang diusulkan Indonesia adalah agar badan tersebut lebih transparan, inklusif, dan berpihak pada seluruh negara anggota.
11. Indonesia juga memiliki kepentingan untuk mendorong isu hilirisasi pada BRICS. Pada *BRICS Foreign Policy Planning Dialogue*, Brasilia, 24 – 25 Maret 2025, Indonesia mendorong BRICS agar mengambil langkah konkret untuk isu mineral kritis dan minyak nabati berkelanjutan.
 - a. Mineral kritis: (i) meningkatkan kapasitas kolektif untuk diversifikasi, stabilitas, dan akses mineral yang adil; (ii) mendukung transformasi *energy* termasuk EV melalui investasi dan riset kolaboratif; (iii) berkolaborasi dalam pemrosesan, perdagangan, dan inovasi teknologi mineral, dan (iv) mendorong pemberdayaan negara berkembang untuk memajukan rantai nilai mineral mereka sendiri.
 - b. Minyak nabati berkelanjutan: (i) melihat keberlanjutan minyak nabati dari aspek yang luas termasuk kebermanfaatannya secara nyata bagi masyarakat kecil; dan (ii) mengambil Langkah bersama melawan praktik perdagangan diskriminatif terhadap minyak sawit.

C. Climate Change

12. Keketuaan Brazil menginginkan adanya sinergi antara BRICS dengan COP30 dalam isu perubahan iklim dengan penekanan untuk menunjukkan hal-hal yang dapat dilakukan negara berkembang melalui kemitraan.
13. Beberapa isu lingkungan yang diangkat Keketuaan Brazil antara lain: (i) desertifikasi, degradasi lahan, dan kekeringan; (ii) pelestarian, pemulihan, dan peningkatan layanan ekosistem; (iii) polusi plastik dan tata kelola sampah; dan (iv) kepemimpinan kolektif untuk aksi iklim yang bersinergi dengan TPB 2030.
14. Pada 1–2 April 2025 telah diselenggarakan *BRICS Contact Group for Climate Change and Sustainability and the Environment Working Group* di bawah Kementerian Lingkungan Brazil. Pertemuan tersebut membahas pentingnya resiliensi, adaptasi, dan mitigasi iklim dapat berjalan beriringan dengan pendanaan iklim, transisi yang adil, serta keadilan iklim.
15. Kemudian pada 3 April 2025, *BRICS Environment Ministers Meeting* telah menyepakati suatu deklarasi yang mempertegas pentingnya *environmental multilateralism* dan *balanced and inclusive global governance* untuk melindungi lingkungan sebagai tujuan bersama.
16. Terkait isu perubahan iklim, Indonesia mendorong agar BRICS dapat: (i) memperkuat kerja sama untuk mempercepat transisi ekonomi rendah-karbon sekaligus perlindungan keanekaragaman hayati; (ii) memperjuangkan agenda iklim yang adil dan inklusif selaras dengan pembangunan berkelanjutan di tingkat global; dan (iii) mendorong optimalisasi pasar karbon melalui adanya metodologi penghitungan karbon yang adil.
17. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) adalah kerangka protokol yang mengatur kerja sama penanganan perubahan iklim. UNFCCC diadopsi pada tahun 1992, dan hingga saat ini terdapat 197 ratifikasi negara pihak dan Uni Eropa.
18. Pengambil keputusan utama UNFCCC dilakukan melalui **Conference of the Parties (COP)** yang bertemu setiap tahun. Keputusan adalah *country-driven* dengan peran Sekretariat UNFCCC terbatas pada dukungan implementasi keputusan COP.
19. Tujuan utama pembahasan dalam UNFCCC COP adalah stabilisasi konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi pada level yang dapat mencegah dampak negatif. Pencapaian level aman tersebut harus dalam kerangka waktu yang cukup bagi ekosistem bumi untuk secara alami beradaptasi dan tidak mengganggu kegiatan produksi bahan makanan, serta pembangunan ekonomi dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
20. Prinsip-prinsip dalam UNFCCC, yaitu:
 - a. *Common but differentiated responsibilities and respective capabilities* (CBDR-RC), yaitu bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab penurunan GRK lebih besar dibandingkan negara-negara berkembang;
 - b. *Intergenerational equity*, yaitu bahwa perlindungan terhadap iklim harus bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa depan;
 - c. *Precautionary measures*, yaitu bahwa prinsip kehati-hatian harus diperhatikan dalam antisipasi dan mitigasi dampak buruk perubahan iklim.

21. Pada *Conference of the Parties* (COP) UNFCCC ke-21, negara pihak berhasil mengadopsi *Paris Agreement* pada tahun 2015, a.l. sebagai upaya dalam mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk dengan membatasi kenaikan suhu global dan mengurangi emisi karbon global. Elemen utama dalam Persetujuan Paris, yaitu:
- Mencegah kenaikan suhu global sebesar 2C, dan mengejar upaya membatasi kenaikan suhu global dibawah **1.5C** pada akhir abad; Meningkatkan kapasitas para negara pihak untuk beradaptasi terhadap efek negatif perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan dan penurunan emisi GRK dengan cara yang tidak akan mengurangi produksi pangan; dan Menjaga alur pendanaan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang mendukung penurunan emisi GRK (pasal 2).
 - Kewajiban semua Negara Pihak untuk menyampaikan **NDC**. Kontribusi penurunan tersebut **harus meningkat** setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan **dukungan** untuk meningkatkan ambisi tersebut (Pasal 3).
 - Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi **mitigasi** (Pasal 4).
 - Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil, seperti **REDD+** (Pasal 5).
 - Pengembangan kerja sama sukarela antarnegara dalam rangka meningkatkan ambisi penurunan emisi termasuk melalui **mekanisme pasar dan non-pasar** (Pasal 6).
 - Penetapan tujuan global adaptasi untuk meningkatkan kapasitas **adaptasi**, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, khususnya bagi negara berkembang (Pasal 7).
 - Pengakuan pentingnya meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan (**loss and damage**), termasuk dampak yang tidak dapat dipulihkan, akibat dampak buruk perubahan iklim (Pasal 8).
 - Kewajiban negara maju** menyediakan sumber **pendanaan** untuk membantu negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi. Pihak lain dapat pula memberikan dukungan secara sukarela (Pasal 9).
 - Peningkatan aksi kerja sama seluruh negara dalam hal pengembangan dan **alih teknologi** (Pasal 10).
 - Perlunya kerja sama Para Pihak untuk memperkuat kapasitas negara berkembang dalam implementasi Persetujuan Paris dan kewajiban negara maju untuk memperkuat dukungan bagi **peningkatan kapasitas** di negara berkembang (Pasal 11).
 - Kerja sama Para Pihak dalam upaya penguatan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik, dan akses publik terhadap **informasi** mengenai perubahan iklim (Pasal 12).
 - Pembentukan dan pelaksanaan kerangka kerja **transparansi** dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan efektivitas implementasi, meliputi aksi maupun dukungan dengan fleksibilitas bagi negara berkembang. Kerangka ini merupakan pengembangan dari yang sudah ada di bawah Konvensi/UNFCCC (Pasal 13).
 - Pelaksanaan secara berkala inventarisasi dari implementasi Persetujuan Paris untuk menilai kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris (**Global Stocktake**) dimulai tahun 2023 dan selanjutnya dilakukan setiap lima tahun (Pasal 14).
 - Pembentukan mekanisme untuk memfasilitasi implementasi dan mendorong **kepatuhan** terhadap Persetujuan Paris (Pasal 15).
22. Sebagai hasil utama dari UNFCCC COP29 tahun 2024 adalah selesainya pembahasan teknis *Article 6* dimana mekanisme perdagangan karbon antar negara di

bawah *Paris Agreement* akan dapat beroperasi secara penuh. Selain itu juga disepakati *key outcome* berupa *Baku Climate Unity Pact* (rujukan dokumen terkait pada <https://unfccc.int/cop29/auvs>), mengenai:

- a. New Collective Quantified Goals
 - Dari sisi *quantum*, meski menyatakan perlunya *scaling up* pendanaan untuk aksi iklim negara berkembang senilai USD 1,3 trilyun per tahun pada 2035, namun target yang ditetapkan untuk NCQG adalah USD 300 milyar per tahun pada 2035;
 - Dari sisi *contributors*, tidak memperjelas aspek mobilisasi pendanaan dari negara maju, namun mendorong keterlibatan negara berkembang untuk turut berkontribusi melalui skema KSS, serta sumber lain, termasuk sektor swasta dan sebagai alternatif;
 - Dari sisi *scope*, difokuskan mendukung NDCs dan peningkatan ambisi negara berkembang, namun tidak mencakup *loss and damage* dan tanpa alokasi spesifik bagi LDCs dan SIDs;
- b. Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Program
 - Mendorong parties, observers dan other stakeholders untuk menyampaikan submisi tentang topik yang akan didiskusikan pada Global Dialogue 2025 (dengan tenggat waktu 25 Februari 2025), dan pandangan mengenai design dan feature platform untuk fasilitasi pelaksanaan aksi mitigasi (dengan tenggat waktu 1 Mei 2025);
- c. Global Goal on Adaptation
 - Menyepakati modalitas penentuan indikator implementasi adaptasi yang akan ditetapkan pada *United Arab Emirates-Belem work program*, dengan kriteria utama agar tidak melebihi 100 indikator; *globally applicable*; merefleksikan berbagai konteks adaptasi dan memungkinkan *assessment of progress*;

Perkembangan Kebijakan Indonesia

- 23. Komitmen aksi iklim Indonesia tercantum pada dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca Indonesia. NDC merupakan kewajiban Persetujuan Paris dan komitmen nasional yang menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan rendah emisi dan berketahanan iklim.
- 24. Pada September 2022, Indonesia telah menyampaikan dokumen ***Enhanced NDCs*** yang di dalamnya memuat peningkatan penurunan emisi GRK dengan kemampuan sendiri, **semula 29% menjadi 31,89%**, sedangkan dengan dukungan internasional dari **41% menjadi 43,20%**.
 - a. Peningkatan tersebut didasarkan pada kebijakan sektoral antara lain, FOLU *Net-Sink* 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, target 100 persen pemanfaatan biodiesel B-40 pada 2030, peningkatan aksi pemanfaatan *sludge* IPAL di sektor limbah, dan peningkatan target di sektor pertanian serta industri.
 - b. Kebijakan lain yang menjadi tambahan muatan dalam ENDC antara lain, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sebagai dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, kebijakan terkait aksi adaptasi Program Kampung Iklim, kebijakan penguatan fungsi Sistem Registri Nasional (SRN) sebagai *carbon registry* dan platform Satu Data GRK dalam kerangka transparansi, serta kebijakan penguatan pendanaan iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sejak Oktober 2019.

25. Sebagai satu paket dengan NDC, Indonesia juga telah menyampaikan **Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050**, yang memuat visi dan *pathways* Indonesia menuju *net-zero emissions* dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, ketahanan iklim dan keadilan. Sektor agrikultur, kehutanan dan lahan (FoLU) dan sektor energi dinilai akan menjadi sektor utama dalam mencapai visi *net-zero emissions* pada 2060 atau lebih cepat.
26. Pada 2025, Indonesia berencana mengajukan *Second NDCs* yang memuat peningkatan ambisi selaras dengan pembatasan target kenaikan temperatur bumi sebesar 1,5 derajat Celcius.
27. Indonesia telah melakukan upaya strategis untuk mengurangi emisi GRK dan menanggulangi dampak perubahan iklim, antara lain:
- Membangun Kerangka Transparansi Nasional sesuai Pasal 13 *Paris Agreement*, melalui Sistem Registri Nasional (SRN).
 - Berkomitmen untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan untuk mencapai ketahanan energi nasional, dengan komposisi energi terbarukan sebesar 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025 dan sebesar 31% pada tahun 2050.
 - Moratorium izin pembukaan lahan yang melindungi 66 juta ha hutan dan lahan gambut.
 - Dari sisi pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada 5 (lima) sektor yang terverifikasi menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi pengurangan emisi GRK sebesar 68.986.099 ton CO₂e dan tahun 2020 sebesar 573.951.814 ton CO₂e dari baseline.
 - Proyeksi rehabilitasi *mangrove* hingga 600.000 ha sampai dengan akhir 2024.
 - Penurunan tingkat deforestasi pada 2020 capai titik terendah sebesar 115 ribu hektar.
 - Menekan kebakaran hutan hingga 290 ribu hektar pada tahun 2020, dibanding 2,6 juta hektar pada tahun 2015, dan 1,6 juta hektar pada tahun 2019.
28. Dalam rangka pengaturan mekanisme pasar terkait karbon, Pemri telah menerbitkan:
- Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)**. Penyusunan Perpres ini ditujukan untuk: (i) menjadi landasan hukum instrumen NEK dan pendanaan lingkungan dalam memenuhi target NDCs; (ii) menangkap peluang pasar dalam perdagangan karbon; dan (iii) memberikan insentif bagi para pelaku pengurangan emisi gas rumah kaca.
 - Peraturan Menteri LHK No 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon**, sebagai regulasi derivatif Perpres 98/2021 tersebut.
29. Dalam hal implementasi nilai ekonomi karbon, Indonesia juga perlu menampilkan *leading by example* atas kemajuan yang telah dilakukan, termasuk melalui peluncuran secara resmi Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023.
- Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon.
 - Perdagangan kredit karbon oleh Indonesia bertujuan untuk mendorong pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan ke depan, menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.

Saran Posisi Indonesia untuk Perubahan Iklim

30. Bagi Indonesia, implementasi sama pentingnya dengan ambisi.
- Mendorong realisasi komitmen pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global sebesar 100 milyar USD (yang dijanjikan pada tahun 2020) untuk direalisasikan hingga 2025.

- b. Mendorong negara maju untuk memimpin komitmen pengurangan emisi, melalui dukungan pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas, termasuk melalui kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
31. Indonesia memandang pentingnya peningkatan kemitraan dan kerjasama global berdasar semangat kesetaraan dan saling menguntungkan, terutama dalam:
- a. Mengembangkan dan mendorong transfer teknologi ramah lingkungan
 - b. Meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan, terutama bagi negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim
 - c. Memobilisasi berbagai sumber daya untuk pendanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - d. Indonesia terus mendorong negara maju untuk memenuhi komitmen penyediaan dana penanganan perubahan iklim sebesar USD 100 milyar/ tahun kepada negara berkembang.
 - e. Meningkatkan kerja sama peningkatan dan pengembangan kapasitas.

Tambahan Informasi Mundurnya AS dari *Paris Agreement*

32. *Executive Order* berjudul "*Putting America First in International Environmental Agreements*", terkait penarikan Amerika Serikat (AS) keluar dari Perjanjian Paris (PA), termasuk pakta, persetujuan, atau komitmen serupa yang dibuat berdasarkan UNFCCC telah ditandatangani oleh Presiden Trump pada tanggal 20 Januari 2025.
33. *Executive Order* berupaya membatasi kontribusi keuangan AS kepada negara-negara lain sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap perubahan iklim secara global.
34. Pada 2017, pada masa pemerintahan Trump yang pertama, AS juga berusaha menarik diri dari Perjanjian Paris. Upaya ini tidak berhasil karena Perjanjian Paris mengharuskan penarikan diri pada saat itu berlaku empat tahun sejak suatu negara meminta mundur. Hal ini berbeda dengan situasi saat ini, yang memungkinkan penarikan berlaku dalam waktu satu tahun setelah penarikan.
35. Dampak AS keluar dari PA yaitu upaya bersama dalam menekan pemanasan global di bawah 2 derajat celcius akan sulit tercapai, mengingat AS merupakan penghasil emisi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Hal ini akan menjadi efek domino bagi negara – negara lainnya, terutama negara berkembang dalam meningkatkan ambisi penurunan emisinya.
36. Sumber pendanaan bagi negara berkembang, terutama untuk mitigasi dan adaptasi akan berkurang, mengingat AS merupakan salah satu donor utama pendanaan terhadap sejumlah proyek iklim global, *Green Climate Fund* (GCF), *Just Energy Transition Partnership* (JETP), maupun skema bilateral melalui USAID.
37. Dapat memperlambat transisi energi baru terbarukan secara global termasuk dari sisi investasi.
38. Dampak AS mundur dari Paris Agreement bagi Indonesia antara lain:
- a. berkurangnya pendanaan untuk proyek adaptasi dan mitigasi iklim, seperti transisi energi dan perlindungan ekosistem dan berbagai program keberlanjutan yang membutuhkan dukungan internasional, seperti FOLU Net Sink 2030.
 - b. Melemahnya insentif global di sektor energi terbarukan dan memperlambat investasi asing dalam proyek PLTS, PLTB, kendaraan listrik di Indonesia, atau program energi lainnya, termasuk skema JETP. Hal ini dapat memperlambat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

- c. Dinamika negosiasi akan berubah dan peran kepemimpinan beralih ke Uni Eropa dan Tiongkok, yang bisa memiliki prioritas berbeda dengan kepentingan Indonesia dalam NCQG (*New Collective Quantified Goal*) dan pendanaan *Loss and Damage*.
 - d. Selain itu, Uni Eropa dan negara maju lainnya dapat mengambil posisi lebih dominan dan mendorong kebijakan yang lebih ketat, seperti mekanisme **CBAM** yang akan mempengaruhi ekspor Indonesia.
39. Belum ada indikasi dari negara bagian lainnya di AS atau perusahaan multi nasional AS yang mengikuti seluruh kebijakan *Executive Order* dari Presiden AS, sehingga masih ada peluang untuk dorong kerja sama iklim.
40. Indonesia perlu mencari alternatif dukungan pembiayaan lain, baik dengan negara maju lainnya, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan domestik dan blended finance untuk mengisi kesenjangan pendanaan iklim.
41. Mundurnya AS dapat memberi ruang bagi negara lain termasuk **Indonesia** untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan aksi iklim global.
42. Jika dirasa perlu diangkat mengenai saran posisi bagi Indonesia:
- a. Pertama, Indonesia terus memantau dan mengkaji berbagai dinamika yg terjadi pasca Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris, serta berbagai pertimbangan yang ada terkait relevansinya bagi Indonesia. Adapun Indonesia masih terus berkomitmen untuk tingkatkan ambisi aksi iklim menuju net-zero emissions dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan.
 - b. Kedua, mengenai *Paris Agreement*, apabila ditinjau kembali relevansinya, perjanjian adalah kerangka komprehensif untuk memandu implementasi aksi iklim serta hak dan kewajiban para negara pihak. Dalam hal ini, terdapat sejumlah aspek utama dalam perjanjian tersebut yang penting bagi Indonesia.
 - c. *Paris Agreement* secara jelas menyatakan prinsip ***common but differentiated responsibilities*** antara negara maju dengan negara berkembang, dimana negara maju punya kewajiban lebih untuk mendukung kesuksesan aksi iklim negara berkembang.
 - **Prinsip tersebut adalah penegasan hak dan sekaligus pelindung bagi negara berkembang yang menjadi negara pihak *Paris Agreement*, termasuk Indonesia**, bahwa aksi iklim yang dilakukan tidak akan menghambat semangat pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.
 - Dengan menjadi negara pihak *Paris Agreement*, Indonesia terus mengusung prinsip dimaksud ketika menghadapi tekanan peningkatan ambisi aksi iklim yang tidak disertai dukungan sarana implementasi dari negara maju.
 - *Paris Agreement* juga merupakan basis operasionalisasi adanya sarana implementasi aksi iklim bagi *developing country parties*, misalnya dalam bentuk *REDD+ Framework (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries)* maupun pasar karbon.
43. **Sejak ratifikasi *Paris Agreement* hingga saat ini, Indonesia tidak dirugikan dan telah mengambil manfaat**, baik dalam hal pembukaan perdagangan karbon, dukungan pendanaan konkret untuk aksi iklim maupun panduan prinsip dasar yang tidak merugikan negara berkembang.

44. Ketiga, keputusan Indonesia mengikat atau melepaskan diri dari suatu perjanjian internasional tentunya perlu pertimbangan seksama dengan memperhitungkan keuntungan, kerugian dan prioritas nasional.
45. Adapun Kemlu RI akan terus lakukan koordinasi dgn berbagai instansi pemerintah terkait, khususnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai *focal point* Indonesia di UNFCCC.

Catatan:

46. **Apabila Indonesia menyatakan menarik diri dari Paris Agreement, ada beberapa dampak administrasi, regulasi dan mekanisme yang perlu diantisipasi oleh Pemri.**
 - ➔ *Paris Agreement* memungkinkan negara pihak untuk menarik diri, tetapi hanya setelah tiga tahun sejak perjanjian mulai berlaku bagi negara tersebut. Setelah mengajukan pemberitahuan penarikan diri, keputusan ini baru efektif setelah satu tahun (Pasal 28).
 - ➔ Meningkatnya tantangan, termasuk dari negara-negara mitra dagang yang menerapkan kebijakan berbasis keberlanjutan, misalnya berupa menguatnya hambatan perdagangan berupa pembebanan tarif pada produk dari negara yang tidak berkomitmen terhadap pengurangan emisi.
 - ➔ Dampak pada kelanjutan investasi dan kerja sama proyek iklim, mengingat banyak proyek hijau dan pendanaan iklim (seperti dari *Green Climate Fund*) yang hanya berlaku bagi negara pihak pada *Paris Agreement*.
 - ➔ Pada tingkat nasional, maka Indonesia akan wajib melakukan perubahan regulasi, mengingat Indonesia telah mengintegrasikan *Paris Agreement* ke dalam hukum nasional melalui UU No. 16 Tahun 2016, yang menjadi dasar hukum berbagai program dan kebijakan menuju *Net Zero Emissions*.
 - ➔ Organisasi masyarakat sipil atau individu bisa mengajukan gugatan terhadap pemerintah jika penarikan diri dianggap merugikan lingkungan ataupun masyarakat.

D. Artificial Intelligence (AI) Governance

47. Dalam beberapa tahun terakhir, isu *AI in the Military Domain* (AIMD) menjadi perhatian komunitas internasional. Tren pasar penggunaan AI dalam militer terus meningkat pesat, pada tahun 2020 sebesar US\$6,3 miliar dan diperkirakan pada 2025 sebesar US\$11.6 miliar. Penggunaan AI semakin meluas dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali di sektor militer. Fenomena munculnya AI dapat dilihat ibarat dua mata koin, menghasilkan manfaat sekaligus ancaman, terkhusus di bidang militer.
48. Secara umum dalam militer, AI bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, presisi, dan daya saing militer suatu negara. AI meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manufaktur alutsista dan menghemat biaya operasional militer dengan mengurangi jumlah *person on-the-ground* dalam tugas tertentu. AI mempercepat analisis data dengan bantuan drone, foto satelit, dan intelijen, sehingga menghasilkan insight dan rekomendasi dalam waktu singkat. Selain itu, AI dapat mengumpulkan intelijen, akuisisi target dan serangan, sistem pemandu rudal dan *drone*, hingga melakukan *battlefield damage assessment* (BDA).
49. Di sisi lain, AI juga membawa ancaman dan risiko. AI mengubah konsep senjata yang sebelumnya dikendalikan manusia menjadi lebih otonom, seperti pada *killer drone* yang bisa memilih target di medan perang tanpa intervensi manusia. Ini berisiko menyebabkan salah sasaran, korban sipil yang tinggi, dan merendahkan martabat manusia dengan memperlakukannya seolah objek belaka karena hidup-matinya

ditentukan algoritma. Selain itu, muncul pula masalah etis soal siapa yang bertanggung jawab atas keputusan AI, penggunaan AI dalam perang modern, dan kepatuhannya pada aturan *international humanitarian law* (IHL). Mengandalkan AI untuk mengambil keputusan dapat berisiko fatal dalam pengambilan keputusan karena dianggap sebagai bentuk lepas tangan dari tanggung jawab manusia.

50. Penerapan kecerdasan buatan di bidang militer juga dapat berdampak pada keamanan dan stabilitas internasional, seperti memicu perlombaan senjata, miscalculation, menurunkan ambang batas terjadinya konflik, mempercepat eskalasi konflik, serta penyebaran teknologi AI ke kelompok non-negara. Selain itu, penggunaan AI juga berisiko menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan gender, ras, usia, atau aspek sosial lainnya akibat bias dalam data atau algoritma yang digunakan.
51. Integrasi AI dalam sistem senjata pemusnah massal, khususnya senjata nuklir, juga dikhawatirkan semakin memundurkan upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir, serta memunculkan risiko yang sudah begitu besar dengan eksistensi senjata nuklir sendiri.
52. Seiring dengan perkembangan AI yang pesat dalam militer, beberapa upaya sudah mulai dilakukan untuk meningkatkan kesadaran global, membahas, dan meregulasi AI baik dalam konteks masing-masing negara, regional, maupun melalui PBB.
53. Dalam konteks multilateral, Komite I SMU PBB pada akhir tahun 2024 telah mengesahkan Resolusi bertajuk "AI in the Military Domain and its Implications for International Security". Dalam kerangka Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), juga telah dilakukan pembahasan panjang untuk mengatur lethal autonomous weapon systems (LAWS). Pembahasan mengenai AI dalam militer juga masuk dalam agenda pembahasan forum- forum multilateral terkait isu keamanan dan perdamaian internasional, seperti Biological Weapons Convention, Chemical Weapons Convention, dan Conference on Disarmament.
54. Dalam tataran multilateral, terdapat beberapa common grounds terkait tata kelola global AI dalam sektor militer, antara lain mengenai keberlakuan Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB dan International Humanitarian Law, keperluan untuk meng-assess implikasi AI dalam sektor militer terhadap perdamaian dan keamanan dunia, pengakuan mengenai kesenjangan AI dan keperluan kerja sama dan bantuan internasional untuk mengatasinya; dan multi stakeholders engagement.
55. Dalam konteks regional, terdapat EU AI Act yang pertama kali diusulkan oleh European Commission pada April 2021. Framework ini bertujuan untuk mengatur penggunaan AI di seluruh EU dengan pendekatan peraturan berbasis risiko.
56. Dalam **konteks masing-masing negara**, beberapa inisiatif dilakukan berkaitan dengan AI dalam militer, diantaranya:
 - a. *Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain (REAIM) Summit* telah diselenggarakan pada Februari 2023 di Belanda dan pada September 2024 di Korea Selatan. Pertemuan ini melibatkan pemerintah, militer, dan akademisi lebih dari 100 negara dan menghasilkan *outcome document* berupa "Call to Action" dan "*Blueprint for Action*" yang disusun tidak secara konsensus. Indonesia hadir dalam kedua pertemuan, namun tidak meng-endorse kedua *outcome document*.
 - b. *Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy* oleh Pemerintah Amerika Serikat. Deklarasi politik bertujuan untuk menyerukan penggunaan AI di militer secara bertanggung jawab sesuai hukum internasional yang berlaku.

- c. *Luxembourg Autonomous Weapon Systems Conference*, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh wakil negara NATO, akademisi, dan think tanks bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu autonomous weapon systems (AWS) serta menjadi platform seluruh pemangku kepentingan untuk mendiskusikan risiko juga tantangan AWS.
 - d. Austria telah menyelenggarakan Konferensi Internasional yang bertajuk “Humanity at the Crossroads: Autonomous Weapons Systems and the Challenge of Regulation” pada tanggal 29-30 April 2024 di Wina. Konferensi ini bertujuan untuk membahas regulasi internasional *autonomous weapon systems* (AWS) yang saat ini memunculkan banyak perdebatan.
57. Sebagai tindak lanjut Resolusi UNGA 79/239 “*AI in the Military Domain and its Implications for International Peace and Security*”, Indonesia menyampaikan *national views* mengenai implikasi dan peluang AI dalam sektor militer terhadap keamanan internasional.

Saran Posisi untuk Artificial Intelligence (AI) Governance

58. Indonesia kiranya perlu mewaspadaai bahwa perkembangan AI dalam sektor militer dapat semakin mempebesar kesenjangan kemampuan pertahanan antar-negara yang asimetrik dan *imbalance warfare*.
59. Indonesia perlu memastikan bahwa perkembangan AI dalam sektor militer tidak menimbulkan implikasi upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, termasuk upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata.
60. Indonesia juga perlu memastikan manfaat nyata bagi kepentingan Indonesia dan negara berkembang, termasuk dengan mendorong *equitable access* terhadap teknologi AI. Dalam hal ini, Indonesia mendorong komitmen kerja sama dan bantuan internasional dengan menyediakan *capacity building* dan kegiatan kerja sama yang komprehensif, bukan hanya dalam meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan responsible AI.
61. Indonesia juga perlu mendorong tata kelola global yang dikembangkan secara inklusif dan menggunakan forum multilateral guna memastikan kepentingan semua negara, termasuk negara berkembang, dapat terakomodir.
62. Dalam konteks militer, Indonesia juga dapat menekankan tentang:
- a. Keberlakuan dan kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan berbagai perjanjian perlucutan dan non-proliferasi senjata;
 - b. Mempertahankan kontrol manusia yang berarti serta *concern* serius terhadap penggunaan AI pada sistem komando, kendali dan komunikasi nuklir;
 - c. Keperluan dialog dan pengkajian lebih lanjut mengenai implikasi AI terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
63. Isu AI telah dibahas dalam beberapa KTT BRICS dalam beberapa tahun terakhir:
- a. KTT BRICS Ke-14 Tahun 2022 telah menghasilkan *Beijing Declaration*: mendorong anggota BRICS untuk bersama-sama mengatasi risiko dan dilema etik mengenai AI, berbagi praktik terbaik, serta mengembangkan pendekatan untuk memastikan penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab.
 - b. KTT BRICS Ke-15 Tahun 2023 telah menghasilkan *Johannesburg Declaration*: memuat komitmen untuk menjadikan AI sebagai dasar penguatan kerja sama intra-BRICS.

- c. KTT BRICS Ke-16 Tahun 2024: menginisiasi pembentukan aliansi negara anggota BRICS dalam isu AI dengan tujuan untuk meregulasi teknologi AI, termasuk untuk mencegah penggunaan AI secara ilegal. Inisiasi tersebut disampaikan oleh Rusia dan diprediksi dapat meningkatkan ekonomi BRICS hingga USD 350 juta – USD 600 juta pada tahun 2030.
- 64. AI kembali menjadi salah satu isu yang dibahas dalam sejumlah pertemuan BRICS di bawah Ketetuaan Brazil. Pada pertemuan *BRICS National Security Advisors (NSA)*, Brasilia, 30 April 2025, turut dibahas dampak AI terhadap keamanan internasional.
- 65. Indonesia mendorong tata kelola AI: (i) mendorong AI untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan bagi Selatan Global; (ii) mendorong tata Kelola AI yang dapat menyeimbangkan standar etika, keamanan nasional, dan prioritas sosial-ekonomi; serta (iii) memastikan bahwa negara berkembang tidak tertinggal dalam revolusi digital.

E. Multilateral Peace and Security Architecture

- 66. Ketetuaan Brazil mendorong BRICS agar dapat menjadi wadah untuk membahas Reformasi PBB termasuk dengan mendorong agar Dewan Keamanan PBB lebih representatif dengan adanya keterwakilan dari negara berkembang. Brazil, India, dan Afrika Selatan termasuk negara yang mengincar kursi sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.
- 67. Isu keamanan internasional juga telah dibahas dalam *BRICS NSA*. Beberapa hal pokok yang dibahas seperti kondisi dunia yang saat ini sedang menghadapi tantangan baru, tidak sekadar konflik di berbagai Kawasan, tetapi juga ancaman dari teknologi dan serangan siber, serta tekanan ekonomi dari negara lain. BRICS berpeluang untuk memainkan peran penting dalam geopolitik global, dengan potensi populasi demografi dan kekuatan ekonomi.
- 68. Dalam hal keamanan internasional yang dibahas pada pertemuan BRICS, Indonesia menyampaikan antara lain: (i) telah menunjukkan konsistensi dalam bidang mediasi dan resolusi konflik, termasuk dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian dan peran aktif dalam menyelesaikan masalah Myanmar; (ii) pentingnya *Two State Solution* dan penghentian konflik dalam konflik Palestina-Israel; dan (iii) menekankan potensi BRICS untuk bisa menjadi pelopor mediasi dan resolusi konflik atas masalah geopolitik global saat ini.

Isu Reformasi DK PBB

- 69. Negosiasi mengenai reformasi DK PBB hingga saat ini masih berjalan dalam kerangka ***Intergovernmental Negotiation (IGN)*** dalam Majelis Umum PBB. Namun demikian, perbedaan mendasar antar negara anggota masih berlanjut di dalam 5 (lima) persoalan kunci, yaitu (i) *Categories of membership*; (ii) *Question of veto*; (iii) *Regional representation*; (iv) *Size of the enlarged Security Council and its working methods*; dan (v) *The relationship between the Security Council and the General Assembly*.
- 70. Isu veto juga diangkat dalam pertemuan MU PBB di bawah mata agenda *Strengthening of the UN System*. Pada tanggal 14 April 2022, Liechtenstein telah mengajukan ranres terkait inisiatif regulasi veto di kerangka MU PBB. Pertemuan dipicu pengalaman penggunaan veto oleh Rusia atas ranres DK PBB terkait serangan militer ke Ukraina. Resolusi MU PBB No. 76/262 berhasil diadopsi dan mengharuskan DK untuk menyelenggarakan *debate* setiap menggunakan hak veto. Indonesia mendukung ranres tanpa menjadi *co-sponsor*.

71. Isu reformasi DK PBB juga menjadi isu yang mengemuka dalam Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tingkat SOM, khususnya berkenaan dengan permintaan kelompok Afrika agar *Declaration on Reinvigorating the NAASP* tetap memuat rujukan terhadap pentingnya penambahan jumlah anggota DK PBB dari kawasan Asia dan Afrika sebagai bagian dari proses reformasi DK PBB.
72. Isu reformasi DK PBB juga menjadi salah satu *cluster* dalam *Pact for the Future* (PftF) yang diadopsi pada 22 September 2024. Secara garis besar, PftF menyepakati *guiding principles* dalam IGN antara lain mengenai *equitable representation* dan meningkatkan representasi negara berkembang dan kawasan yang *underrepresented* di keanggotaan DK PBB.
73. Sejumlah negara atau blok telah menyampaikan proposal model reformasi DK PBB, yaitu Meksiko, Liechtenstein, kelompok L.69, G4 (India, Brazil, Jerman, Jepang), dan *Uniting for Consensus* (UfC) (Indonesia merupakan *observer*).
74. Terdapat perbedaan antara proposal G4 dan UfC, antara lain:
- a. *Categories of Membership*: proposal G4 mendorong perluasan keanggotaan permanen, sementara proposal UfC tidak mendukung usulan tersebut. Dalam hal ini, UfC mengusulkan kategori baru, yaitu *"longer-term membership"*, di mana anggota non-permanen dapat menduduki kursinya lebih dari 2 (dua) tahun (UfC belum menyepakati durasi keanggotaan kategori baru tersebut).
 - b. *Question of Veto*: G4 mendukung perluasan hak veto bagi anggota tetap DK PBB setelah diadakan *review mechanism* 15 tahun setelah reformasi, sementara UfC menekankan perlunya pengaturan veto untuk keadaan- keadaan yang terkait *mass atrocities* dan *war crimes*.
75. Saat ini sesi IGN di bawah sesi Majelis Umum PBB ke-79 sedang berlangsung dan sejauh ini tercatat terdapat **6 (enam) pertemuan**, yaitu:
- a. Pertemuan pertama IGN pada 19 dan 21 November 2024 mengenai *Category of Membership* dan *Cross-Regional Representation*.
 - b. Pertemuan kedua IGN pada 15 dan 16 Januari 2025 mengenai *Question of Veto*
 - c. Pertemuan ketiga IGN pada 27 dan 28 Februari 2025 mengenai *Working Methods*
 - d. Pertemuan keempat IGN pada 15 dan 16 April 2025 mengenai *Size and Regional Representation*
 - e. Pertemuan kelima IGN pada 28 dan 29 Mei 2025
 - f. Pertemuan keenam IGN pada 23 dan 24 Juni 2025
76. Indonesia terus mendorong reformasi sistem multilateral yang mengedepankan prinsip keadilan (***equity***) dan **keterwakilan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang** dalam masa depan tata kelola global.
77. Indonesia mendukung pembahasan **reformasi DK PBB** dalam kerangka ***Intergovernmental Negotiation (IGN)***, dan mendorong agar kemajuan proses pembahasan dalam kerangka IGN dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak-pihak terkait. Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan di IGN.
78. Indonesia mengedepankan konsensus dalam proses IGN dan peningkatan keterwakilan Kawasan dan kelompok yang selama ini kurang terwakili. Indonesia juga mendorong pembahasan IGN agar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dan meningkatkan dialog antar kelompok untuk mendorong kemajuan pembahasan.

79. Berkaitan dengan **Categories of Membership**, posisi Indonesia adalah:
- Perlu pembahasan secara fundamental mengenai ketimpangan keterwakilan antar kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang serta *major world constituencies* dalam 2 kategori keanggotaan, yaitu anggota tetap dan tidak tetap.
 - Keanggotaan perlu refleksikan situasi geopolitik dan geoekonomi.
80. Berkaitan dengan **Question of Veto**, Indonesia berpandangan bahwa hak veto **pada akhirnya** harus dihapuskan karena tidak demokratis dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan antar sesama negara berdaulat. Sambil terus mengupayakan hal tersebut, Indonesia mendukung usulan sejumlah negara untuk menghidupkan kembali inisiatif **pembatasan penggunaan veto untuk isu humaniter, pelanggaran hukum internasional, kejahatan perang dan genosida**.
81. Berkaitan dengan **Regional Representation**, terdapat keperluan untuk mencari keseimbangan terhadap realitas geopolitik dan keterwakilan kawasan, dengan mempertimbangkan: ketidakseimbangan keterwakilan yang sangat besar untuk **Asia dan Afrika**; meningkatkan keterwakilan **negara berkembang**; dan perlunya keterwakilan **world major civilizations dan constituencies** sebagai cerminan keberagaman dan pluralitas dari dunia dewasa ini.
82. Berkaitan dengan Size of the Enlarged Security Council and its Working Methods:
- Indonesia memandang isu ini terkait erat dengan upaya **meningkatkan efisiensi dan efektivitas** untuk memperbesar akses dan memperdalam keterlibatan negara-negara non-DK dalam pembahasan dan proses kerja DK.
 - Terkait **working method**, terdapat tiga hal utama yang perlu ditingkatkan yaitu informasi, konsultasi dan kerja sama.
 - Mendorong peningkatan *best practices* seperti mendorong dialog dengan *Troops/Police Contributing Countries* (T/PCCs) untuk isu PKO, serta menjaga koordinasi dengan PBC.
83. Berkaitan dengan **relationship between the Security Council and the General Assembly**, Indonesia mendukung **interaksi lebih besar** antara DK dengan para anggota PBB, organ utama PBB, organisasi regional serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan mutu keputusan DK serta meningkatkan rasa kepemilikan bersama.
84. Indonesia berpandangan bahwa proposal terkait Reformasi DK harus mendapatkan **"the widest possible acceptance"** dari sebanyak mungkin negara- negara anggota PBB.
85. Indonesia merupakan negara pengamat pada kelompok *Uniting for Consensus* (UfC). Penting bagi Indonesia untuk terus mengikuti dinamika perdebatan UfC dengan *groupings* lain di IGN agar kiranya Indonesia tetap berkontribusi positif terhadap kemajuan IGN dan bersikap lebih fleksibel guna mencari jalan tengah dan mencapai konsensus.

Isu Palestina

86. Tahap pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berakhir pada 1 Maret 2025. Hingga saat ini belum ada kemajuan yang berarti dalam negosiasi gencatan senjata Tahap kedua antara Israel dan Hamas.
- Masih terdapat perbedaan yang mendalam antara Israel dan Hamas dalam perundingan, namun terdapat keinginan untuk melanjutkan perundingan

87. Pasca berakhirnya gencatan senjata, pada tanggal 17 Maret, Israel kembali mulai menyerang Gaza dan telah menewaskan lebih dari 1000 warga, termasuk wanita dan anak-anak.
88. Pada bulan April 2025, Hamas dilaporkan telah mengajukan proposal baru gencatan senjata kepada para Mediator (Mesir dan Qatar) yang berisikan 5 butir klausa:
- a. Pembebasan seluruh sandera yang ditawan Hamas dan sejumlah tahanan Palestina
 - b. Gencatan senjata selama 5 tahun
 - c. Pengembalian posisi sebelum 2 maret, yaitu penghentian operasi militer, kembalinya posisi pasukan Israel sesuai kesepakatan 17 Januari 2025, dan kembali masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza
 - d. Pembentukan komite teknokratik lokal yang terdiri dari tokoh-tokoh independen untuk memerintah Gaza
 - e. Kesiapan Hamas untuk berpartisipasi dalam rekonsiliasi nasional Palestina berdasarkan persetujuan antar faksi-faksi Palestina, yang terkini adalah Beijing Agreement tahun 2024
89. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan seruan kepada Hamas untuk melepaskan kontrol atas Gaza dan menyerahkan semua senjatanya kepada Pemerintah Palestina. Prioritas Pemerintah Palestina saat ini adalah menghentikan perang di Gaza dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza.
90. Meskipun demikian gencatan senjata di Gaza dipandang terkendala oleh dua faktor utama: (i) Keberadaan Hamas pasca perang yang ditolak tidak saja oleh Israel atau AS, tetapi juga sebagian besar negara-negara Arab (ii) Posisi politik dalam negeri Israel rentan terkait dugaan korupsi dan kegagalan mengantisipasi Peristiwa 7 Oktober, sehingga PM Netanyahu memerlukan agenda perang sebagai "*political survival*".
91. Sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga gencatan senjata, DK PBB telah mengadopsi 4 (empat) resolusi terkait situasi di Gaza.
- a. 15 November 2023 – Resolusi 2712 (2023) mengenai "urgent and extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza strip".
 - b. 22 Desember 2023 – Resolusi DK 2720 (2023) yang menggarisbawahi kewajiban state parties berdasarkan hukum humaniter internasional untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan secara segera, aman, dan tak terganggu kepada masyarakat sipil Palestina di Gaza.
 - c. 25 Maret 2024 – Resolusi 2728 (2024) yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan sebagai langkah awal menuju gencatan senjata permanen dan mendorong pelepasan tahanan serta akses bantuan kemanusiaan.
 - d. 10 Juni 2024 – Resolusi 2735 (2024) yang mendukung ceasefire plan Amerika Serikat
92. Sementara itu, Majelis Umum PBB melalui *Emergency Special Session* ke-10 (ESS-10) dengan tema "*Illegal Israeli Actions in Occupied East Jerusalem and the Rest of Occupied Palestine Territory*" berhasil mengadopsi 6 (enam) resolusi terkait situasi di Gaza, yaitu:
- a. 27 Oktober 2023 – Resolusi "Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations" (A/RES/ES-10/21).
 - b. 12 Desember 2023 – Resolusi yang menyerukan "immediate, durable, and sustained humanitarian truce" di Gaza (A/RES/ES-10/22).
 - c. 10 Mei 2024 – Resolusi "Admission of New Members to the United Nations" yang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi Palestina seperti negara-

- d. negara anggota PBB lainnya, kecuali hak untuk memberikan suara dan mendaftar menjadi anggota organ PBB seperti DK atau ECOSOC (A/RES/ES- 10/23).
 - e. 18 September 2024 – Resolusi “on the ICJ Advisory Opinion regarding the Occupied Palestinian Territory” yang menyerukan Israel untuk mengakhiri okupasi ilegalnya di Palestina serta mendukung hasil Advisory Opinion ICJ (A/RES/ES-10/24).
 - f. 11 Desember 2024 – Resolusi “Support for the mandate of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East” (A/RES/ES- 10/25) berhasil diadopsi.
 - g. 11 Desember 2024 - Resolusi yang mendesak gencatan senjata di Gaza (A/RES/ES-10/26) berhasil diadopsi.
93. Pada 19 Desember 2024, Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta *advisory opinion* (AO) *International Court of Justice* (ICJ) mengenai kewajiban bantuan kemanusiaan Israel untuk Palestina dan memaksa Israel untuk mematuhi hukum internasional (A/RES/79/232) diadopsi.
94. Indonesia telah mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan keterangan sebagai berikut:
- 90,41 ton bantuan kemanusiaan pada November 2023 yang terdiri dari kebutuhan dasar, medis, dan sanitasi,
 - 242,6 ton bantuan pada 18 Januari 2024;
 - 900 parasut yang digunakan dalam operasi *airdrop* bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Maret 2024;
 - bantuan finansial senilai 1 juta Dolar AS untuk mendukung pengobatan korban konflik Palestina yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Mesir.
 - Pada 9 Agustus 2024 dan 6 September 2024, Indonesia telah mengirimkan 35 tenaga kesehatan TNI untuk mendukung misi kesehatan UAE di Kapal Roro UAE yang diubah menjadi RS terapung sementara di El-Arish.
95. Mulai tahun 2023, Indonesia telah meningkatkan kontribusi rutin pada UNRWA.
- Sebelumnya kontribusi per tahun sebesar USD 200.000.
 - Sejak krisis Gaza Oktober 2023, Indonesia meningkatkan kontribusi menjadi USD 600.000.
 - Mulai 2024, kontribusi tersebut kembali ditingkatkan menjadi sebesar USD 1.200.000.
 - Di samping itu, Indonesia juga menandatangani Perjanjian Hibah dengan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam rangka bantuan dan perlindungan untuk orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan di wilayah pendudukan Palestina senilai USD 2.000.000.
96. Indonesia terus memperjuangkan dukungan terhadap Palestina, dengan tujuan utama (i) gencatan senjata permanen dan segera (ii) masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan (iii) pengakuan negara palestina dan keanggotaan Palestina di PBB sebagai untuk mendukung pencapaian *two state solution*.
97. Indonesia terus menyuarakan seruan untuk segera lakukan *ceasefire* dan memastikan akses bagi bantuan kemanusiaan di berbagai forum PBB (DK, Komite I, II, III, VI, SMU PBB 78, Biro CEIRPP) serta dalam pertemuan OKI dan GNB.
98. Indonesia turut memberikan dukungan (baik *written statement* maupun *oral statement*) dalam proses AO Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri.

99. Indonesia mendukung seluruh Resolusi Majelis Umum PBB terkait Palestina sejak 7 Oktober 2024, dan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan Dewan Keamanan PBB.
100. Pada berbagai forum kerja sama Multilateral, termasuk di DK PBB, Indonesia mengangkat bahwa akar masalah konflik Israel-Palestina adalah penjajahan yang belum berakhir.
101. Palestina selalu menjadi isu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia.
- Indonesia selalu menegaskan posisinya di berbagai forum internasional bahwa Palestina adalah negara berdaulat, sesuai dengan prinsip solusi dua negara.
 - Indonesia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga “solusi dua negara” berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
 - Indonesia secara konsisten memberikan bantuan kepada bangsa Palestina baik melalui Pemerintah maupun organisasi internasional dalam bentuk bantuan finansial maupun program pembangunan kapasitas pemerintah dan rakyat Palestina.
102. Akar konflik Israel-Palestina adalah pendudukan Israel dan berbagai pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina, serta menolak sikap *double standard* yang ditunjukkan sejumlah negara terhadap kejahatan Israel
103. Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui *two-state solution* berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati bersama.
104. Indonesia menekankan pentingnya akses bantuan kemanusiaan, serta mendesak Israel untuk menjamin akses kemanusiaan ke wilayah Gaza
105. Indonesia juga selalu menekankan pentingnya aksi kolektif masyarakat internasional dan terus memberikan tekanan kepada Israel melalui berbagai forum internasional.
106. Indonesia berkomitmen untuk mendukung Palestina menjadi anggota penuh di berbagai organisasi internasional, khususnya PBB.

F. Institutional Development

107. Sejumlah isu pengembangan institusi yang mengemuka semasa Keketuaan Brazil di BRICS antara lain: (i) Revisi terhadap *Terms of Reference (ToR) BRICS* agar urutan keketuaan dapat mengikutsertakan anggota-anggota baru; (ii) Membentuk repositori digital resmi bagi para anggota; serta (iii) Agar pertemuan-pertemuan BRICS lebih banyak *engagement* dengan masyarakat sipil.
108. Indonesia mendukung upaya pengembangan institusi yang dilakukan BRICS dengan tujuan untuk memastikan BRICS dapat lebih adaptif dan efektif. Indonesia juga mengusulkan agar pertemuan-pertemuan BRICS pada tingkat teknis dapat dilaksanakan secara *hybrid* agar dapat memastikan kehadiran delegasi Pusat.

Penyusunan Multilateral Development Bank

109. Reformasi *Multilateral Development Bank* (MDB) bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap dari kegiatan pembiayaan, konsultasi, kebijakan dan *blending*.
110. Sejumlah pembahasan utama dalam reformasi MDS:
- a. Meningkatkan kapasitas pembiayaan
 - b. Pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi
 - c. Mobilisasi modal swasta

- d. Peningkatan transparansi dan inklusivitas
- e. *Sustainability* dan tata kelola yang kuat

Reformasi IMF-World Bank

- 111. Reformasi IMF-WB diperlukan untuk meningkatkan relevansi, inklusivitas, dan efektivitas kedua lembaga dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
- 112. Fokus utama reformasi IMF-WB:
 - a. Peningkatan keterwakilan negara berkembang
 - b. Penyesuaian dengan tantangan ekonomi modern
 - c. Penanganan krisis utang
 - d. Peran dalam perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan
 - e. Modernisasi instrument keuangan
 - f. Tata kelola yang transparan dan akuntabel

Perpajakan internasional di forum multilateral

- 113. PBB telah mengadopsi resolusi nomor 78/230 mengenai “*Promotion of Inclusive and Effective International Tax Cooperation at the United Nations*” pada Sidang Majelis Umum PBB sesi 78 tahun 2023
 - Resolusi bertujuan untuk mendorong kerja sama perpajakan internasional yang lebih inklusif dan efektif di bawah naungan PBB.
 - Resolusi merespons tantangan global mengenai pajak, terutama *tax avoidance and tax evasion*, dan memastikan negara-negara berkembang dapat berpartisipasi penuh dalam tata kelola perpajakan global.
 - Resolusi mencerminkan kebutuhan reformasi dalam sistem perpajakan global yang lebih adil dan seimbang, terutama dalam konteks meningkatnya ketidaksetaraan dan praktik *tax avoidance* yang merugikan banyak negara, khususnya negara berkembang.
- 114. Sebagai tindak lanjut, telah diadopsi Terms of Reference (ToR) untuk United Framework Convention on International Tax Cooperation, dan akan dilanjutkan kembali negosiasi resolusi untuk Promotion of Inclusive and Effective International Tax Cooperation at the UN.
 - Seluruh draft konvensi diharapkan dapat disampaikan pada SMU PBB tahun 2027.

Intensi Indonesia bergabung ke New Development Bank

- 115. *New Development Bank* (NDB) adalah bank pembangunan multilateral (MDB) yang dibentuk oleh negara-negara BRICS pada bulan Juli 2014.
- 116. NDB memiliki kantor pusat di Shanghai, RRT dan Pusat Regional Afrika di Johannesburg, Afrika Selatan.
- 117. NDB bertujuan mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di BRICS dan ekonomi pasar negara-negara berkembang.
- 118. Awalnya NDB memiliki modal sebesar USD 100 milyar yang dikontribusikan oleh *founding members*-nya (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).
 - a. Modal awal yang disetorkan pada NDB sebesar USD 50 milyar yang terbagi menjadi saham disetor (*paid-in shares*) sebesar USD 10 milyar dan saham yang dapat dikelola (*callable shares*) sebesar USD 40 milyar.

- b. Masing-masing anggota memiliki hak suara sebesar jumlah *shares* yang dimiliki pada modal Bank.
119. NDB mulai memperluas keanggotaannya pada September 2021 dengan diterimanya Bangladesh, Uni Emirat Arab (UEA) dan Uruguay. Mesir adalah anggota baru keempat yang diterima keanggotaannya pada Desember 2021. Seluruh anggota baru menyetorkan modal awal, dan miliki share:
- a. Bangladesh: 9.420 (USD 942 juta, 1,79%)
 - b. Mesir: 11.960 (USD 1.1960 juta, 2.27%)
 - c. UAE: 5.560 (USD 556 juta, 1.06%)
- Catatan: Uruguay belum melakukan pembayaran karena masih konsolidasi di dalam negeri untuk menyelesaikan prosedur dari prospektif menjadi *full member*.
120. Presiden RI telah secara resmi menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung pada *New Development Bank* pasca pertemuan bilateral Presiden RI dengan Presiden NDB tanggal 25 Maret 2025.
121. Pada kunjungannya Presiden NDB ke Jakarta tanggal 24-26 Maret 2025, sejumlah hal yang diangkat:
- a. NDB merupakan bank pembangunan yang dibentuk oleh dan untuk negara berkembang, yang menghargai kedaulatan nasional negara. NDB beroperasi berdasarkan masukan negara anggota dan tidak menerapkan kondisionalitas yang memberatkan;
 - b. Hingga saat ini, NDB memiliki delapan negara anggota, terdiri atas lima negara pendiri BRICS dan tiga anggota baru, yaitu Persatuan Emirat Arab, Bangladesh, dan Mesir;
 - c. Menurut Wakil Presiden NDB, besaran *authorized capital* NDB mencapai USD 100 miliar, dengan USD 52,7 miliar telah di-subscribed, yaitu USD 50 miliar oleh lima negara pendiri BRICS dan sisanya oleh tiga anggota lainnya;
 - d. Total *paid-in capital* saat ini berjumlah USD 10 miliar dari lima negara pendiri, serta USD 539 juta dari tiga anggota lainnya. NDB juga memiliki dana sekitar USD 1,5 miliar yang berasal dari berbagai pendapatan.

Posisi Indonesia terhadap reformasi International Financial Architecture (IFA)

122. Indonesia menekankan pentingnya reformasi IFA agar negara berkembang dapat memperoleh manfaat penuh dari sistem keuangan internasional. Reformasi diperlukan untuk mencerminkan kepentingan ekonomi negara berkembang secara adil. Reformasi ini mencakup:
- a. Suara yang setara dalam pengambilan keputusan
 - b. Akses yang adil terhadap sumber keuangan global
 - c. Partisipasi dalam perumusan kebijakan mengenai pendanaan dan mobilisasi sumber daya

Reformasi MDBs

123. Mendukung inisiatif penghubungan MDBs dengan bank pembangunan nasional dan daerah untuk meningkatkan dampak pembangunan di semua level.
124. MDBs harus memaksimalkan dampak pembangunan mereka, termasuk dengan meningkatkan representasi geografis dan gender.

Reformasi IMF-World Bank

125. Indonesia terus mendorong Bank Dunia untuk meningkatkan daya saingnya.=

126. Mendesak pengurangan harga pinjaman agar pembiayaan lebih terjangkau bagi negara berpenghasilan rendah (LICs) dan menengah (MICs).

Kerja Sama Perpajakan

127. Menyambut baik adopsi resolusi "Promotion of Inclusive and Effective International Tax Cooperation at the *United Nations*".
128. Resolusi ini menegaskan perlunya reformasi sistem pajak global untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih adil dan seimbang.
129. Sistem perpajakan yang direformasi akan:
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama internasional.
 - Memastikan bahwa semua negara, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, dapat memperoleh manfaat yang setara dari pertumbuhan ekonomi global.
130. Indonesia menantikan kemajuan dalam perundingan terkait Konvensi PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional.

Indonesia dan NDB

131. Indonesia bermaksud untuk bergabung pada NDB dan memanfaatkan NDB untuk pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.

Pengembangan Kelembagaan BRICS *Parliamentary Forum* di Bidang HAM

132. BRICS secara konsisten menekankan pentingnya prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, dan kesetaraan dalam sistem internasional. HAM tidak menjadi agenda khusus di forum-forum BRICS, termasuk BRICS *Parliamentary Forum*. Meskipun demikian, isu HAM tetap menjadi bagian dari diskusi, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan penguatan multilateralisme.
133. Pendekatan BRICS terhadap HAM cenderung menolak standar ganda dan intervensi sepihak, dengan menekankan bahwa HAM harus dipromosikan melalui dialog dan kerja sama antarnegara. Hal ini sejalan dengan posisi umum RI yang menekankan prinsip-prinsip obyektivitas, imparialitas, non-selektif, non-standar ganda, mendorong dialog konstruktif dan kerja sama dalam pemajuan HAM.
- Catatan: saat ini sejumlah negara BRICS menjadi anggota Dewan HAM PBB (Brazil, RRT, Indonesia, dan Ethiopia)
134. Tercatat sejumlah isu HAM yang pernah diangkat dalam BRICS *Parliamentary Forum* sampai saat ini antara lain:

6 th BRICS <i>Parliamentary Forum</i> (2020)
→ Menegaskan pentingnya sistem internasional multipolar yang didasarkan pada kesetaraan kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap HAM.
→ Soroti kepentingan untuk memperkuat peran koordinatif PBB dalam penegakan isu HAM dan menolak upaya pelemahan kerangka multilateral yang ada.
9 th BRICS <i>Parliamentary Forum</i> (2023)
→ Tekankan pentingnya pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan, HAM, serta perdamaian dan keamanan global.

10th BRICS Parliamentary Forum (2024)

➔ Menekankan pentingnya pemenuhan kesetaraan gender dan serta promosi dan penguatan hak perempuan.

135. Dalam rangka pengembangan kelembagaan BRICS *Parliamentary Forum* di bidang HAM, kiranya dapat dijabarkan pengusulan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Dialog HAM *BRICS Parliamentary Forum* dengan fokus tematik tiap tahunnya, yang dapat menghasilkan rekomendasi terkait legislasi HAM untuk masing-masing parlemen negara BRICS.
 - b. Promosi Kerja Sama di bidang HAM, antara lain dengan program pertukaran legislasi HAM antar parlemen atau *best practices* terkait mekanisme implementasi kewajiban HAM internasional, serta peningkatan kapasitas tenaga teknis parlemen terkait isu-isu HAM.
 - c. Penyampaian *Joint Statement* terkait isu HAM yang menjadi kepentingan bersama pada forum-forum multilateral terkait.

Dit. Sosbud OINB, 8 Mei 2025



Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
SNAPSHOT HUBUNGAN BILATERAL
INDONESIA – BRASIL



DATA SINGKAT HUBUNGAN RI-BRASIL	
Hubungan Diplomatik	Dibuka pada Maret 1953
Perwakilan Diplomatik	Duta Besar RI Y.M. Edi Yusup (Penyerahan <i>credentials</i> kepada Presiden Jair Bolsonaro pada 4 Juni 2019) <i>Ambassador of the Federative Republic of Brazil to Indonesia</i>, H.E. George Monteiro Prata (Penyerahan <i>credentials</i> kepada Presiden di Jakarta tanggal 23 Oktober 2023) Dubes Brasil untuk ASEAN: H.E. Henrique Archanjo Ferraro (Penyerahan <i>credentials</i> kepada Sekjen ASEAN di Jakarta tanggal 21 Maret 2024) Catatan: Indonesia mempunyai 2 (dua) konsul kehormatan di Brasil: - Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Recife, Pernambuco, Mr. Anton Arthur Lundgren Werner - Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Blumenau, Santa Catarina, Mr. Luiz Carlos Barravieira Junior
Mekanisme Bilateral	1. Sidang Komisi Bersama (SKB) 2. Forum Konsultasi Bilateral (FKB) 3. <i>Consultative Committee on Agriculture</i> (CCA) 4. <i>Working Group on Trade and Investment</i> (WGTI)
Total Perdagangan (Kemdag RI)	Jan-Feb 2025: USD 889,4 juta <u>2024: USD 7,15 miliar</u> USD 6,13 miliar (2023) USD 5,39 miliar (2022) USD 4,13 miliar (2021) USD 3,57 miliar (2020) USD 2,93 miliar (2019)
Ekspor RI ke Brasil (Kemdag RI)	Jan-Feb 2025: USD 331,5 juta <u>2024: USD 1,72 miliar</u> 2023: USD 1,27 miliar 2022: USD 1,49 miliar 2021: USD 1,50 miliar 2020: USD 1,01 miliar 2019: USD 997 juta
Impor RI dari Brasil (Kemdag RI)	Jan-Feb 2025: USD 557,9 juta <u>2024: 5,42 miliar</u> 2023: USD 4,85 miliar 2022: USD 3,9 miliar 2021: USD 2,62 miliar 2020: USD 2,56 miliar 2019: USD 1,93 miliar
Neraca Perdagangan (Kemdag RI)	Jan-Feb 2025: Defisit Indonesia USD 226,4 juta <u>2024: Defisit Indonesia 3,7 miliar</u> 2023: Defisit Indonesia USD 3,5 miliar 2022: Defisit Indonesia USD 2,41 miliar

	2021: Defisit Indonesia USD 1,11 miliar 2020: Defisit Indonesia USD 1,54 miliar 2019: Defisit Indonesia USD 938 juta
Ekspor Utama RI ke Brasil (KBRI Brasilia-DF)	Minyak kelapa sawit, alat media, karet alam, spareparts motor, sepatu olahraga, kotak persneling, benang, sepatu olahraga, mesin printer.
Impor Utama RI dari Brasil (KBRI Brasilia-DF)	Limbah kedelai, gula tebu, <i>flours and pellets</i> , gandum, kapas, crude <i>petroleum oils</i> , tembakau, jagung, bubur kertas, kopi larut.
Investasi Brasil di RI (BKPM)	<u>2024: 359 proyek senilai US\$ 9,6 juta</u> 110 proyek senilai USD 6,97 juta (2023) 34 proyek senilai USD 8,8 juta (2022) 27 proyek senilai USD 282,1 ribu (2021) 55 proyek senilai USD 682,5 ribu (2020) 43 proyek senilai USD 18,7 juta (2019) Investasi Brasil di Indonesia dilakukan antara lain oleh perusahaan pembibitan sapi PT. Asia Beef Biofarma Indonesia, perusahaan tambang VALE (d/h <i>Companhia Vale do Rio Doce</i>) pada perusahaan nikel PT. Vale Indonesia (d/h PT. INCO Soroako) oleh anak perusahaan, VALE Canada, berkantor pusat di Toronto, Kanada.
Investasi RI di Brasil	• Indoagri Brazil Participacoes Ltd (<i>holding company</i> PT. Indofood Sukses Makmur); • Djarum melalui Golden Leaf Tobacco; • Rajawali Garuda Emas (Anak Perusahaan April Group) di bidang produk kertas; • FKS Group (gula). Catatan: Informasi diperoleh dari media elektronik
Wisatawan Brasil ke Indonesia (BPS)	<u>2024: 32.031 orang</u> 2023: 29.497 orang 2022: 14 855 orang 2021: 952 orang 2020: 5.945 orang 2019: 30.232 orang
WNI di Brasil	<u>Februari 2025</u> : 299 orang

KONDISI DALAM NEGERI

Pemerintahan Presiden Lula

1. Presiden Terpilih Lula dan Wakil Presiden Geraldo Alckmin telah dilantik pada 1 Januari 2023 untuk masa jabatan 1 Januari 2023 – 31 Desember 2026.
2. Presiden Lula mendukung re-industrialisasi Brasil, investasi dan teknologi di ekonomi hijau. Selain itu, Presiden Lula juga berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan di Brasil. Lebih lanjut, ditekankan juga komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan.
3. Pemerintahan Lula juga berupaya mencari pembiayaan dan kerja sama, baik nasional dan internasional, untuk investasi publik dan swasta, guna mendorong dan memperluas pasar konsumen domestik, mengembangkan perdagangan, jasa, pertanian pangan dan industri.
4. Data IMF, untuk tahun 2023, GDP Brasil tumbuh 2,9 persen, tumbuh menjadi ekonomi terbesar ke-9 di dunia. Data Pemerintah Brasil, tingkat pengangguran 2023 turun ke angka 7,8 persen, terendah sejak tahun 2015. Upah minimum telah berhasil melampaui tingkat inflasi.
5. Data IMF untuk tahun 2024 GDP Brasil 3,7 persen (*estimate*) dan untuk 2025 sebesar 2,2 persen.
6. Data *Fundacao Getulio Vargas* (FVG), tingkat kemiskinan di Brasil terendah pada tahun 2023 yaitu 8,3 persen dari populasi (sekitar 16,9 juta orang). Hal ini mengingat naiknya pendapatan sebesar 11,5 persen.

7. Di bawah Pemerintahan Lula, Brasil juga telah berhasil menyepakati Reformasi Pajak untuk menstimulasi investasi, ekspor dan kesetaraan sosial. Sementara itu, sebagai komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup, Brasil pada 2023 telah berhasil menurunkan tingkat deforestasi di Amazon hingga 50 persen. TW I 2024, tingkat deforestasi telah turun 40 persen.
8. Brasil memegang Presidensi G20 sejak 1 Desember 2023 yang mengusung tema “*Building a Just World and a Sustainable Planet*” dan 3 (tiga) isu prioritas, yaitu inklusi sosial dan melawan kelaparan; transisi energi dan pembangunan berkelanjutan; dan reformasi institusi tata kelola global.
9. Presidensi Brasil di G20 telah menginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) untuk aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan (*Task Force on Global Alliance Against Hunger And Poverty*). *Task Force on Global Alliance Against Hunger and Poverty* ini akan beranggotakan negara-negara G20 dan seluruh negara dan organisasi internasional yang berkomitmen dengan pengentasan kemiskinan dan kelaparan guna mencapai target SDG 1 dan SDG 2.
10. Brasil memiliki program makan bergizi gratis/murah bagi kalangan tidak mampu, penyandang disabilitas, lansia, anak sekolah di restoran komunitas dan sekolah. Anggaran berasal dari Pemerintah Negara Bagian dengan juga bermitra dengan swasta, petani, dan UMKM.
11. Presidensi G20 Brasil juga membentuk 2 (dua) *Engagement Group* baru yaitu Justice20 dan Ocean20.
12. Presidensi G20 Brasil telah tuntas dengan diadopsinya *Leaders’ Declaration* pada KTT G20 di Brasil tanggal 19 November 2024. Presiden RI didampingi Menko Perekonomian, Menlu, Menkeu, dan Seskab ikut hadir pada KTT G20 Brasil.
13. Per 1 Januari 2025, Brasil juga memegang Presidensi BRICS, dengan fokus Kemitraan Selatan Global dan Reformasi Tata Kelola Global. Pada tanggal 6 Januari 2025, Brasil juga telah mengumumkan secara formal bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS.
14. 6 (Enam) prioritas Presidensi Brasil di BRICS, yaitu kerja sama kesehatan global; perdagangan, investasi dan keuangan; melawan perubahan iklim; tata kelola kecerdasan buatan; reformasi sistem multilateral di bidang perdamaian dan keamanan; perkembangan kelembagaan BRICS.
15. Pada 19 Februari 2025 di Brasilia-DF, Sherpa Brasil di BRICS menyampaikan prioritas Presidensi BRICS sesuai arahan Presiden Lula da Silva:
 - a. Di bidang kesehatan, BRICS perlu memberikan perhatian pada penyakit-penyakit tropis dan umum terjadi, namun kurang mendapat perhatian;
 - b. Di bidang perdagangan, masih harus ditingkatkan kegiatan perdagangan antar negara BRICS yang selama ini masih sangat jauh dari potensi yang dimiliki negara-negara anggota;
 - c. Upaya penggunaan mata uang setempat dalam kegiatan perdagangan antar negara anggota BRICS;
 - d. Penanggulangan perubahan iklim yang semakin buruk dan upaya-upaya pengadaan sumber dana untuk perubahan iklim;
 - e. Penanganan secara tepat untuk bidang penggunaan AI;
 - f. Peningkatan berbagai sarana kelembagaan dan semua jenis perangkatnya untuk mempermudah keikutsertaan negara-negara anggota baru dalam forum BRICS.
14. Ketua Kerja Sama Front Parlemen Brasil dengan negara-negara anggota blok ekonomi BRICS dan beberapa anggota Parlemen Brasil menekankan beberapa hal sbb:
 - a. Dalam situasi lingkungan global yang penuh tantangan khususnya beberapa kebijakan Pemerintah AS yang tidak bersahabat dengan negara berkembang, BRICS diharapkan dapat meningkatkan/ mempersatukan kerja sama Global South;
 - b. Pentingnya meningkatkan solidaritas di antara negara anggota BRICS;
 - c. Memperkuat kerja sama perdagangan yang inklusif dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan termasuk kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim.

HUBUNGAN POLITIK

Kepentingan Indonesia terhadap Brasil

1. Brasil adalah mitra dagang dan investasi terbesar RI di Kawasan Amerika Selatan: potensi ekspor dan sumber investasi; mengurangi defisit perdagangan; sumber wisatawan terbesar dari Amerika Selatan;
2. Brasil dan MERCOSUR dapat dijadikan *hub* ke pasar yang lebih luas; dukungan Brasil dalam pembentukan perjanjian dagang Indonesia dengan MERCOSUR;
3. Pangsa pasar sawit Indonesia terbesar di kawasan;
4. Transfer teknologi dan *best practices* di bidang industri pertahanan, pertanian (gula dan kedelai), peternakan (sapi), perikanan (akuakultur), kehutanan (tata kelola hutan berkelanjutan).

Kepentingan Brasil terhadap Indonesia

5. Akses pasar produk pertanian antara lain unggas, daging sapi dan kedelai Brasil; target industri pertahanan Brasil;
6. Pasar dan *hub* di Asia Tenggara bagi produk ekspor Brasil;
7. Pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara (Brasil sebagai mitra dialog sektoral ASEAN).

Hubungan Bilateral

8. RI dan Brasil mendeklarasikan Kemitraan Strategis pada 18 November 2008 melalui penandatanganan Dokumen Kemitraan Strategis oleh Menlu RI, Hasan Wirajuda dan Menlu Brasil, Celso Amorim di Brasilia pada 18 November 2008. Sebagai implementasi, dokumen *Plan of Action* Kemitraan Strategis ditandatangani pada 15 Oktober 2009 di Brasilia.
9. Telah dilakukan saling kunjung pada level kepala pemerintahan dengan saling kunjung terakhir adalah Pertemuan Bilateral Presiden RI, Joko Widodo dengan Presiden Brasil, Lula da Silva, di sela-sela KTT G-7 di Hiroshima, 20 Mei 2023.
10. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brasil, Carlos Alberto Franco França, di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali pada 7 Juli 2022.
11. Pertemuan 55th ASEAN *Foreign Ministers' Meeting* menyepakati pemberian status Mitra Sektoral ASEAN bagi Brasil sebagaimana juga tercantum pada *Joint Communiqué of the 55th ASEAN Foreign Ministers Meeting*.
12. Di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77 tanggal 23 September 2022, Menlu RI telah melakukan pertemuan *tête-à-tête* dengan Menlu Brasil membahas (1) pentingnya kesepakatan *leaders' declaration* pada KTT G20 di Bali dan (2) pentingnya *concrete deliverables* G20 bagi komunitas global.
13. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brasil, Mauro Vieira di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di New Delhi pada 2 Maret 2023. Pada pertemuan ini, dibahas mengenai kerja sama trilateral hutan tropis RI-Brasil-Kongo dan kelanjutan rencana Indonesia-MERCOSUR CEPA.
14. Menlu Brasil Y.M. Mauro Vieira melakukan kunjungan ke Indonesia 8-10 Oktober 2023, kemudian pada 9 Oktober 2023, dilaksanakan pertemuan bilateral antara Menlu RI dan Menlu Brasil, serta pertemuan trilateral dengan Sekretaris Jenderal ASEAN.
15. Hal yang mengemuka dalam pertemuan Menlu RI dengan Menlu Brasil sebagai berikut:
 - ➔ Penyegaran kembali Kemitraan Strategis melalui Revitalisasi Rencana Aksi: Kedua Menlu telah menandatangani *Revitalized Plan of Action for the Implementation of the Declaration on the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the Federative Republic of Brazil (2023-2026)*;
 - ➔ Sepakat terjemahkan kerja sama konkret, a.l. bidang energi terbarukan, iptek dan inovasi, digital, kesehatan, pangan, dan pertahanan, serta prioritaskan ketahanan energi, pangan dan kehutanan;
 - ➔ Menlu RI mengundang Brasil untuk berinvestasi di IKN Nusantara dan sektor pangan antara lain peternakan sapi, tanaman pangan dan perkebunan. Kedua Menlu juga tekankan pentingnya berbagi pengalaman dalam pemindahan ibu kota;

- Di bidang kerja sama lingkungan hidup dan kehutanan, kedua Menlu menggarisbawahi peran *biofuel* dalam ketahanan dan transisi energi dan sepakat memperdalam kerja sama di bidang *bioethanol* dan *biodiesel*;
- Terkait *Global South*, kedua Menlu sepakat untuk perkuat kerja sama bidang keamanan pangan, dengan dukungan riset, pengembangan, investasi, teknologi bagi produktivitas pangan, dan produksi bersama vaksin penyakit mulut dan kuku, serta mendorong komitmen negara-negara maju terkait pembiayaan perubahan iklim dan membentuk agenda internasional dengan menyuarakan kepentingan negara berkembang.

16. Menlu Brasil mengundang Menlu RI untuk hadir pada *High Level Open Debate on the Situation in the Middle East* di New York, 24 Oktober 2023. Menlu RI dan Menlu Brasil telah lakukan pertemuan bilateral di sela-sela agenda, membahas pentingnya peran *UN Security Council* untuk upaya perdamaian di Gaza.
17. Di sela-sela *G20 Foreign Ministers' Meeting* di Rio de Janeiro, pertemuan bilateral Menlu RI-Menlu Brasil dilaksanakan pada 20 Februari 2024 dengan fokus bahasan: perdagangan, undangan kepada Presiden untuk hadir pada *The 10th World Water Forum*, IM-CEPA, dan eskalasi konflik di Gaza.
18. Di sela-sela KTT BRICS Plus di Kazan Rusia tanggal 23-24 Oktober 2024, Menlu RI Sugiono telah melakukan pertemuan *pull-aside* dengan Menlu Brasil, sampaikan komitmen meningkatkan hubungan bilateral.
19. Di sela rangkaian Pertemuan G20 FMM di Johannesburg, Afrika Selatan, 19 Februari 2025, Wamenlu RI Arrmanatha Nasir telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil. Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Brasil terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Sebagai anggota baru di BRICS, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh agenda dan workstream BRICS. Brasil berharap agar Presiden RI dapat menghadiri KTT BRICS pada Juli 2025 di Rio de Janeiro sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia di forum tersebut. Wamenlu RI berharap Brasil dapat turut mendukung agar ASEAN dapat diundang pada KTT G20 di Afzel.
20. Kedua pihak juga membahas dinamika terkini seperti tantangan multilateralisme dan urgensi reformasi sistem keuangan dunia di tengah situasi ekonomi global yang sulit. Indonesia dan Brasil sepakat mengenai pentingnya upaya bersama dalam mendorong reformasi tatanan global agar lebih inklusif dan mencerminkan keseimbangan geopolitik saat ini. Indonesia percaya bahwa kerja sama antara negara-negara *Global South* harus diperkuat untuk memastikan sistem global yang lebih adil dan representatif.
21. Dalam konteks bilateral, kedua pihak membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan dan sepakat untuk menyusun *roadmap* kerja sama bilateral yang lebih komprehensif dan terdiversifikasi, termasuk program makan bergizi gratis bagi siswa. Indonesia juga mengharapkan dukungan Brasil guna segera memulai negosiasi IM-CEPA. Brasil menyampaikan negosiasi sempat terhambat fokus penyelesaian EU-MERCOSUR CEPA.
22. Pada 24 Februari 2025 di Brasilia, di sela *Sherpas Meeting* G20, Sherpa BRICS Indonesia sampaikan keinginan untuk membahas 3 (tiga) isu prioritas RI dalam BRICS, yaitu *Sustainable Vegetable Oil*, *carbon pricing* dan *critical minerals*. Brasil sampaikan ingin BRICS fokus pada isu pembangunan, fasilitasi perdagangan, menyusun pesan yang kuat untuk isu EUDR dan tidak tersandera isu geopolitik.
23. Pada 24-25 Februari 2025 di Cape Town, di sela FCBG dan FMCBG G20, Wamenkeu RI telah berdiskusi dengan Brasil terkait Biofuel termasuk *Global Biofuel Alliance* yang telah diluncurkan Brasil bersama AS dan India. Pertemuan juga membahas pengembangan hidrogen dan perlunya mengembangkan pasar karbon dan interoperabilitasnya.
24. Di sela *BRICS NSA Meeting* di Brasilia, tanggal 29 April 2025, Wamenhan RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan Penasehat Khusus Presiden Brasil untuk Bidang Luar Negeri, Celso Amorim, dengan pokok:

- Sambut bergabungnya Indonesia di BRICS;
- Kerja sama pertahanan berkembang khususnya di bidang aviasi;
- Mendorong terwujudnya Dialog 2+2 dan kerja sama pertukaran pengetahuan dan kerja sama teknis di bidang biofuel.

25. Di sela *BRICS Foreign Ministers' Meeting* di Rio de Janeiro, pada 27 April 2025, Menlu RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil, dengan pokok:

- Menlu RI sampaikan komitmen perkuat hubungan bilateral RI-Brasil ke arah yang positif. Dibahas peluang pengembangan kerja sama di bidang ketahanan pangan dan energi (khususnya produksi pangan, daging sapi, susu dan energi terbarukan), kerja sama pendidikan (pendidikan tinggi dan pertukaran pelajar) dan kesehatan (pelayanan kesehatan dan penanggulangan penyakit menular seperti TBC).
 - Kedua Menlu berharap dapat dikembangkan kerja sama praktis dan *doable* menggunakan kerangka Kemitraan Strategis yang telah ada;
 - Dukungan dan komitmen terhadap intensitas pertemuan pejabat tinggi kedua negara;
- Menlu RI sampaikan prioritas Pemerintahan dalam bidang swasembada pangan dan energi; hilirisasi; dan investasi di *human capital*. Menlu Brasil sampaikan terdapat sejumlah kesamaan prioritas Pemerintahan khususnya di bidang peningkatan *human capital* antara lain melalui program makan bergizi untuk anak sekolah dan vaksinasi;
- Terkait BRICS, Menlu RI sampaikan terima kasih atas dukungan Presidensi Brasil terhadap bergabungnya Indonesia di BRICS. Menlu Brasil sampaikan apresiasi atas kehadiran Menlu RI dan kontribusi Indonesia di BRICS. Brasil juga menyampaikan harapan agar Presiden RI dapat menghadiri KTT BRICS pada Juli mendatang di Rio de Janeiro dimana Indonesia telah berikan indikasi positif;
- Kedua Menlu juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan komitmen dalam isu perubahan iklim mengingat dampaknya terhadap negara-negara berkembang;
 - Menlu RI sampaikan dukungan terhadap Presidensi COP-30 Brasil;
- Menlu RI – Menlu Brasil memandang penting peningkatan hubungan ASEAN dengan Brasil, serta ASEAN – BRICS.

Mitra Sektoral ASEAN

26. Pertemuan *55th ASEAN Foreign Ministers' Meeting* menyepakati pemberian status Mitra Sektoral ASEAN bagi Brasil sebagaimana juga tercantum pada *Joint Communique of the 55th ASEAN Foreign Ministers Meeting*.
27. Sebagai tindak lanjut pemberian status mitra sektoral, ASEAN dan negara mitra pada umumnya akan membentuk sebuah rencana kerja yang tertuang dalam Practical Cooperation Areas. Pembahasan akan dilakukan oleh Sekretariat ASEAN (selaku koordinator), ASEAN Committee Permanent Representatives (CPR), dan perwakilan negara mitra sektoral di Jakarta.
28. Pada tanggal 1 Desember 2022, telah dilaksanakan *The 1st ASEAN-Brasil Joint Sectoral Cooperation Committee (JSCC)* di Jakarta. Pertemuan mengadopsi *Terms of Reference Committee* tersebut. Juga dibahas, perkembangan dan arah kerja sama kemitraan sektoral ASEAN-Brasil, antara lain untuk bidang keamanan pangan, kehutanan dan pertanian, energi terbarukan, *e-governance* dan konektivitas digital, perubahan iklim, *smart cities*, wisata berkelanjutan dan infrastruktur, industri penerbangan, *people-to-people contacts*, dan kursus bahasa Portugis untuk diplomat ASEAN.
29. Brasil mengaksesi TAC pada 2011 di bawah Keketuaan Indonesia dan pertemuan trilateral pertama dengan Brasil sebagai Mitra Sektoral ASEAN tanggal 9 Oktober 2023 juga terjadi ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN.
30. Pada pertemuan trilateral dengan Sekjen ASEAN, 9 Oktober 2023, kedua Menlu sepakat memperkuat hubungan ASEAN-Brasil:
- Menlu Brasil apresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, serta meningkatnya “*economic and political weight*” Indonesia dan ASEAN;
 - Menyepakati pendalaman kerja sama di bidang perdagangan, keamanan pangan dan energi, serta pembangunan berkelanjutan;

→ Pertemuan juga mendorong finalisasi Practical Cooperation Areas ASEAN-Brasil sebagai kerangka kerja sama yang dapat dirasakan manfaatnya langsung bagi masyarakat.

31. Pada tanggal 27 November – 8 Desember 2023 , telah dilaksanakan *ASEAN Technical Mission to Brazil* yang dilakukan di bawah payung kerja sama ASEAN-Brasil. Diidentifikasi kerja sama potensial meliputi *transfer of knowledge and best practices* dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi industri *sugarcane*; peningkatan produktivitas industri pertanian dan peternakan melalui *science-based agriculture*; dan pemanfaatan teknologi, program residensi peneliti di bidang kesehatan, serta pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan vokasi.
32. *The 2nd ASEAN-Brazil Joint Sectoral Cooperation Committee* dilaksanakan di Jakarta pada 14 Desember 2022 yang mengadopsi *ASEAN-Brazil Sectoral Dialogue Partnership: Practical Cooperation Areas (2023-2027)*.
33. Pertemuan juga menekankan pentingnya peningkatan upaya pembangunan kapasitas dan berbagi pengalaman untuk isu perubahan iklim, energi terbarukan, pertanian, ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, serta iptek dan inovasi.
34. *The 3rd AB-JSCC Meeting* telah dilaksanakan di Jakarta pada 3 Desember 2024. ASEAN dan Brasil menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kemitraan dialog sektoral melalui implementasi PCA. Pada tahun 2023, ASEAN dan Brasil bekerja sama di bidang bioenergi, ketahanan pangan dan bahasa Portugis.

Kerja Sama Pertahanan

35. RI dan Brasil telah menandatangani *Defence Cooperation Agreement (DCA)* pada 4 April 2017.
→ Telah disahkan menjadi UU 68 Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024.
36. Secara umum, ke depannya, kerja sama potensial di bidang pertahanan yang dapat didorong antara lain:
→ Pengembangan dan transfer teknologi roket *multiple launch rocket system (MLRS)* jangkauan hingga 200km;
→ Melanjutkan pembahasan kerja sama transfer teknologi *unmanned aerial vehicle (UAV)*, yang penting untuk pengawasan wilayah perbatasan dan hutan lebat di Indonesia;
→ Penyertaan program Bahasa Portugis untuk mendukung kelancaran pelatihan militer.
37. Perkembangan kerja sama angkatan darat dirasa sudah signifikan melalui pelaksanaan *Army to Army Talks* pada 2022 dan 2024 serta program pertukaran personel secara resiprokal.
38. Kerja sama angkatan udara masih berupa pengiriman personel TNI AU untuk simulasi pesawat Super Tucano di Brasil. Lebih lanjut, inisiasi *Airman to Airman Talks* sedang berlangsung.
39. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI Bersama dengan Kementerian Pertahanan Brasil telah menyelenggarakan Indonesia-Brasil Bilateral Defence Meeting (IBDD) yang menghasilkan *Minutes of The 1st Bilateral Defence Meeting Indonesia-Brazil 2023*.
40. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan dan delegasi Brasil dipimpin Wakil kepala Hubungan Internasional *Brazilian Armed Forces (EMCFA)*, dan dari Kemlu RI dihadiri oleh Direktorat Amerika II dan Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN. Hasil pertemuan antara lain: potensi pengembangan industri pertahanan, pelatihan militer, dan pertukaran informasi.
41. Pembentukan *2+2 Defense Dialogue* diusulkan di level *senior officials c.q.* Direktur Jenderal Amerika dan Eropa dan Direktur Jenderal Strategi dan Pertahanan yang rencananya dilaksanakan di Brasilia pada 2025, *back-to-back* dengan FKB ke-9 RI-Brasil.
42. Pada bulan April 2024, telah dilaksanakan kegiatan 2 tahunan *2nd Indonesia-Brazil Army Staff Conference* membahas rencana kegiatan tahun 2025-2026.

Kerja Sama Pertanian dan Vaksin PMK

43. Brasil telah mengembangkan praktik pertanian dan peternakan yang berkelanjutan, rendah karbon dan menggunakan *minimal land-use*. Brasil memiliki jumlah *comercial herd* terbesar di dunia

dengan jumlah 197,2 juta dan produksi sebesar 10,6 juta ton di 2023. Brasil siap mendukung Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan bibit unggul sapi dan penyediaan vaksin untuk pengendalian PMK.

44. Dalam kunjungan Menteri Pertanian Brasil ke Indonesia pada 10-12 September 2022, dilakukan penandatanganan MOU Kerja Sama Pertanian RI-Brasil.
45. Telah dilakukan penandatanganan Protokol Kesehatan Hewan dan Karantina di antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI dengan Sekretariat Kesehatan Hewan dan Tumbuhan, Kementerian Pertanian dan Peternakan Brasil di sela-sela KTT Amazon di Belem, 8-9 Agustus 2023.
46. Pada tanggal 30 Oktober 2023 di Jakarta, Wamenlu RI telah menerima kunjungan dari Mentan Brasil Carlos Favaro dan mendorong kerja sama di bidang ketahanan pangan dan energi; perdagangan dan investasi pertanian; R&D produk pangan; serta Indonesia-MERCOSUR CEPA dan *Global South*.
47. Selain melakukan pertemuan dengan Wamenlu, Mentan Brasil juga melakukan pertemuan dengan Mentan RI, dan menyaksikan penandatanganan *Technical Arrangements for Foot and Mouth Disease Vaccine Development Cooperation*.
48. Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian RI telah menerima 81.500 donasi vaksin penyakit kuku dan mulut (PMK) dari Pemerintah Brasil pada 8 Agustus 2022. Setelah diterima, vaksin tersebut kemudian disimpan di fasilitas *cool room* milik Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) di Bogor;
49. Donasi tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian RI ke Brasil pada 26 Mei 2022. Selain pemberian vaksin dari Pemerintah Brasil, terdapat pula tawaran donasi vaksin sebanyak 300.000 dosis dari produsen/eksportir daging sapi terbesar di Brasil yakni JBS S.A.
50. Mentan RI – Mentan Brasil juga telah bertemu di sela-sela *G20 Agriculture Ministerial Meeting* di Cuiaba, Brasil tanggal 12-13 September 2024. Pertemuan mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi khususnya daging sapi beku dan sapi perah, serta KST untuk kesehatan hewan.
51. KBRI Brasilia telah dorong rencana pengembangan dan produksi bersama vaksin PMK Indonesia – Brasil dengan pertemuan dengan Kementan Brasil dan produsen vaksin PMK Ourofino Saude Animal pada 16 Oktober 2024, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementan RI.
52. Di bidang investasi pertanian, telah disepakati (September 2024) komitmen awal kerja sama investasi antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 3i Brazil (3i Group) bernilai kisaran Rp 4,5 triliun yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Pertanian tengah bahas beberapa opsi lahan di Poso, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Kerja Sama Energi

53. Di bidang energi, kerja sama potensial yang dapat didorong dengan Brasil antara lain **transfer pengetahuan terkait pengembangan etanol** baik secara teknologi, manajemen, regulasi, dan skema insentif.
54. Brasil merupakan produsen bahan bakar etanol terbesar ke-2 di dunia dengan teknologi pertanian yang efisien. Kementerian ESDM tengah kerja sama dengan Brasil untuk pengembangan dan prospek bioethanol di Indonesia dengan metodologi teknologi Brasil melalui tebu.
55. Brasil memiliki keunggulan dalam *feedstock* untuk bioetanol dan biofuel, dengan manajemen yang efisien. Kerja sama transfer pengetahuan diharapkan meningkatkan efektivitas produksi, rantai pasok, penguatan regulasi, skema insentif serta penentuan nilai jual.
56. Pada 9 Oktober 2023, Menlu Brasil juga telah membuka acara Seminar *Sustainable Mobility: Ethanol Talks* dengan penekanan pada peran biofuel dalam pengurangan emisi di bidang

transportasi yang dapat menjadi area fokus kerja sama potensial antara Brasil dan negara-negara ASEAN, perlunya kolaborasi multistakeholder untuk pengembangan dan implementasi biofuel, serta dukungan kerangka kebijakan dan teknologi untuk capai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Global Biofuel Alliance (GBA)

57. GBA merupakan inisiatif India yang diluncurkan di sela-sela KTT G20 di India tanggal 9 September 2023 oleh India, Singapura, Bangladesh, Italia, AS, Brasil, Argentina, Mauritius dan PEA.
58. GBA bertujuan mendorong pengembangan dan implementasi biofuel serta memposisikan biofuel dalam transisi energi, pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
59. Indonesia belum bergabung:
 - Kebijakan Pemri amat selektif untuk menjadi anggota OI baru;
 - Dokumen pendirian GBA belum jelas, termasuk dalam hal komitmen anggotanya;
 - GBA duplikasi dari beberapa inisiatif sebelumnya termasuk Biofuture Platform yang diikuti sebagian anggota G20 termasuk Indonesia;
 - GBA lebih fokus pada pengembangan *bioethanol-based biofuel* (telah dicoba untuk masukkan biodiesel namun tidak berhasil);
 - Indonesia perlu mencermati dulu bagaimana GBA sebagai *observer*.

MEKANISME BILATERAL

60. RI-Brasil memiliki mekanisme dialog bilateral **Forum Konsultasi Bilateral (FKB)** sebagai mekanisme bilateral tertinggi dan **Sidang Komisi Bersama (SKB)**. Pelaksanaan FKB dan SKB RI-Brasil sempat terhenti tahun 2015 karena hukuman mati kepada WN Brasil. FKB kembali dilaksanakan pada 2020.
61. Sidang Komisi Bersama (SKB)
 - i. SKB ke-1 diselenggarakan di Brasilia, Brasil, 14 - 15 Oktober 2009;
 - ii. SKB ke-2 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, 3- 4 Oktober 2011.
62. Forum Konsultasi Bilateral (FKB)
 - i. FKB ke-1 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada Maret 1997;
 - ii. FKB ke-2 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada Agustus 1998;
 - iii. FKB ke-3 diselenggarakan di Brasilia, Brasil pada April 2001;
 - iv. FKB ke-4 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada Maret 2008;
 - v. FKB ke-5 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada September 2010;
 - vi. FKB ke-6 diselenggarakan di Brasilia, Brasil pada Januari 2013;
 - vii. FKB ke-7 diselenggarakan secara virtual pada 16 Desember 2020;
 - viii. FKB ke-8 diselenggarakan di Balikpapan pada 4 Mei 2023, dirangkaikan dengan kunjungan lapangan ke Ibu Kota Negara (IKN).
63. Berikut adalah hasil pertemuan FKB ke-8:
 - Penguatan kembali hubungan bilateral RI-Brasil melalui pembentukan **Rencana Aksi Kemitraan Strategis 2023-2026**;
 - Penguatan kerja sama **pengembangan ekonomi berbasis inovasi**;
 - Pembentukan kerja sama program **pertukaran pengetahuan dan keahlian** anatara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan Kantor Federal Distrik Brasilia;
 - Pembahasan usulan pembentukan **2+2 Dialogue**.
64. *Consultative Committee on Agriculture (CCA)*
 - i. CCA ke- 1 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada Maret 2007;
 - ii. CCA ke-2 diselenggarakan di Brasilia, Brasil pada Mei 2008;
 - iii. CCA ke-3 diselenggarakan di Mataram, Indonesia pada Mei 2009;
 - iv. CCA ke-4 diselenggarakan di Sao Paulo, Brasil pada September 2010;
 - v. CCA ke-5 diselenggarakan di Medan, Indonesia pada Mei 2011.
65. *Working Group on Trade and Investment (WGTI)*
 - i. WGTI ke-1 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, pada Juli 2012;
 - ii. WGTI ke-2 diselenggarakan di Brasilia, Brasil, pada September 2013.

FORUM MULTILATERAL

PENCALONAN INDONESIA

Telah Memiliki Kesepakatan:

1. Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
2. Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C periode 2024-2025.
3. Anggota United Nations Board of Auditor (UNBOA) periode 2026-2032 (Indonesia cq Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)).
4. Anggota Badan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027.
5. Anggota CND periode 2024-2027.
6. Anggota CCPCJ periode 2024-2027.
7. Anggota Dewan ITU Region E periode 2023-2026.

Pending/Belum Meminta Dukungan:

1. Anggota Executive Board UNESCO periode 2023-2027.
2. Auditor Eksternal International Maritime Organization (IMO) periode 2024-2027.
3. Anggota Committee of Non-Governmental Organizations (CNGO) 2027-2030.
4. Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2029-2030.
5. Anggota Peacebuilding Commission (PBC) periode 2029-2030.
6. Anggota ACABQ periode 2027-2029.

PENCALONAN BRASIL

Telah Memiliki Kesepakatan:

1. Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori B periode 2024-2025.
2. Anggota Badan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027.
3. Kandidat Brasil sebagai Dirjen IMSO
4. Anggota CND periode 2024-2027
5. Anggota CCPCJ periode 2024-2027

Belum Menerima Permintaan Dukungan:

1. Anggota Economic and Social Council (ECOSOC) periode 2027-2029.
2. Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2037-2038.

Catatan:

Brasil telah meminta dukungan Pemri terhadap pencalonan Brasil sebagai Ketua Dewan Eksekutif Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) Tahun 2025.

Brasil juga meminta dukungan Pemri terhadap pencalonan Brasil sebagai Anggota Dewan IMO Periode 2026-2027 Kategori B.

Brasil meminta dukungan Pemri terhadap pencalonan Brasil sebagai Anggota Dewan ICAO Group I periode 2025-2028.

Saat ini, Brasil tengah menjabat sebagai Anggota Komisi PBB untuk Pembangunan Perdamaian (*Peacebuilding Comission*) periode 2025-2026, setelah terpilih kembali secara aklamasi pada Desember 2024.

EKONOMI

Perdagangan

Nilai Perdagangan RI – Brasil (dalam juta USD)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total	2.934,1	3.575,9	4.131,2	5.387,1	6.133,9	7.146,2
Ekspor	997,9	1015,1	1.509,7	1.487,1	1.277,5	1.722,1
Impor	1.936,2	2.560,8	2.621,1	3.900,1	4.856,4	5.424,1
Neraca	-938,3	-1.545,7	-1.111,4	-2.413	-3.578,9	-3.702

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

66. Total nilai perdagangan Indonesia-Brasil untuk periode pada 2024 mencapai USD 7,15 milyar.

67. Ekspor Indonesia ke Brasil pada 2024 tercatat USD 1,72 miliar dan impor Indonesia dari Brasil tercatat mencapai USD 5,42 miliar. Berdasarkan data tersebut, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Brasil sebesar USD 3,7 miliar.

Perkembangan RI-MERCOSUR CEPA

68. Indonesia dan Mercosur sudah melalui 2 tahapan peninjauan perundingan yaitu *Perspective Dialogue* diselenggarakan September 2019 sementara *Exploratory Meeting* diselenggarakan tanggal 27 Oktober 2020 (I) dan 9 Desember 2021 (II).
69. Dalam pertemuan telah terdapat persamaan posisi Pemri dengan MERCOSUR pada seluruh isi teks dari chapter di dalam *scoping paper*.
70. Pada pertemuan bilateral Menlu RI-Brasil, 9 Oktober 2023, kedua Menlu sepakat mendorong perdagangan yang berkelanjutan dan lebih seimbang melalui diversifikasi, pembukaan akses pasar dan dimulainya perundingan Indonesia-MERCOSUR CEPA (IM-CEPA):
- a) Kedua Menlu mendorong pembahasan tim teknis terkait kedua negara perihal prosedur sanitari dan fitosanitari sebagaimana tertuang dalam PoA 2023-2026 untuk mendorong kemudahan pembukaan akses pasar komoditas pangan bagi kedua belah pihak;
 - b) Terkait IM-CEPA, Brasil sampaikan terdapat interest dan mendukung komitmen MERCOSUR untuk pembentukan IM-CEPA meskipun sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat.

Catatan Perkembangan

- ➔ RI telah mendorong peran Brasil sebagai *pro-tempore Presidency* hingga Desember 2023 untuk dimulainya perundingan Indonesia-MERCOSUR CEPA. Diharapkan putaran pertama perundingan dapat dilaksanakan pada 2024. Telah dilakukan pendekatan lanjutan ke Brasil di tingkat juru runding, di sela-sela pertemuan WG TII G20 di Rio de Janeiro, 26-28 Juni 2024;
- ➔ Selama ini, dalam lakukan *engagement* terhadap Brasil, Brasil juga kerap menjadikan isu internal MERCOSUR dan masih difokuskannya penyelesaian EU-MERCOSUR CEPA sebagai *pretext* belum dapat dimulainya putaran pertama IM-CEPA.
- ➔ Pada bulan Februari 2025, Dubes Brasil sampaikan bahwa appetite dalam negeri Brasil untuk segera mulai negosiasi IM CEPA mendapat dukungan dari sektor agrikultur. Sementara, sektor industri lain seperti alas kaki, tekstil dan elektronik merasa terancam mengingat potensi ekspor Indonesia ke Brasil.

Pendirian Indonesian Trading House

71. Pada 10 November 2020, Direktorat Amerika II telah memfasilitasi penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) antara Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan Badax Comercial untuk Pendirian *Indonesian Trading House* di Santa Catarina, Brasil.
72. Selain LoI dengan GAPMMI dan Badax Comercial, ditandatangani pula *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kokola Indonesia (PT Mega Global Food Industry Gresik Jawa Timur) yang menyepakati kerja sama pemasaran produk makanan kecil Kokola senilai US\$ 3 juta/tahun di Brasil dengan kontrak selama 5 tahun.

Investasi

73. Perkembangan investasi Brasil dari 2017 sampai 2021 tercatat masih fluktuatif. Investasi Brasil tampak mulai mengalami peningkatan pada tahun 2022. Tahun 2023 tercatat sebesar USD 6,9 juta dalam 110 proyek. 2024 tercatat US\$ 9,6 juta.
74. Investasi dilakukan antara lain pada sektor industri kulit dan alas kaki, makanan, property, hotel dan restoran, perdagangan, dan industri serta jasa lainnya.

Investasi Brasil di Indonesia Periode 2019 - 2024

Component	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investment (in thousand US\$)	18,749.5	682.5	282.1	8,803.0	6,977.1	9,600
Projects (total)	43	55	27	34	110	359

Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2020 s/d 2023

Sektor Industri	2020		2021		2022		2023	
	Proyek	Investasi (USD ribu)	Proyek	Investasi (USD ribu)	Proyek	Investasi (USD ribu)	Proyek	Investasi (USD ribu)
Industri Makanan	1	0.0	1	0.0	1	523.2	2	16.9
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	5.2	1	0.0	4	696.9	2	786.4
Perdagangan dan Reparasi	6	27.7	3	37.3	5	151.7	14	162.3
Hotel dan Restoran	11	12.7	3	168.5	6	103.0	32	2,292.5
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	5	0.0	-	-	1	-	1	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	0.9	6	46.9	7	185.9	25	2,514.5
Jasa Lainnya	28	636.0	13	29.4	10	374.0	34	1,204.5
Total	55	682.5	27	282.1	34	8,803.0	110	6,977.1

Sumber: NSWI Kementerian Investasi/BKPM, Oktober 2024 (data detail per industri tahun 2024 belum dirilis)

75. Perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Brasil yaitu:

- IndoAgri Brazil Participacoes Ltd (*holding company* PT. Indofood Sukses Makmur);
- Djarum melalui Golden Leaf Tobacco;
- Rajawali Garuda Emas (Anak Perusahaan April Group) di bidang produk kertas;
- FKS Group (gula).

76. Indonesia perlu terus menawarkan potensi investasi kepada Brasil, khususnya di sektor strategis dan potensial antara lain biofuel dan makanan.

77. Di sela-sela KTT G20 Brasil 2024 di Rio de Janeiro tanggal 17 November 2024, telah dilaksanakan *Indonesia-Brazil Business Forum*. Forum dihadiri oleh Presiden RI dan jajaran, 58 peserta Brasil dan 57 peserta Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI undang investasi Brasil di sektor energi, peternakan, maritim, dan hilirisasi. Ditandatangani 5 (lima) kesepakatan senilai total US\$ 2,86 milyar:

- PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Embraer (Nilai kerja sama mencapai USD 1,2 miliar);
- PT Asiabeef, 3i Group, Zebuembryo, Barra Mansa (Nilai kerja sama mencapai USD 950 juta);
- Apical dan Belem Bio Energia;
- Apical dan Agropalma;
- PT Asia Pacific Rayon – Embravision.

Cat.: Nilai kerja sama poin c, d dan e sebesar USD 710 juta.

Pariwisata

78. Jumlah wisatawan Brasil ke Indonesia menurut BPS adalah 32.031 orang (2024), 29.497 orang (2023), 13.966 orang (2022), 952 orang (2021), 5.945 orang (2020), 30.232 orang (2019), 26.503 orang (2018), dan 32.403 orang (2017).

HUBUNGAN SOSIAL BUDAYA DAN KONSULER

SOSIAL BUDAYA

MoU BPOM-ANVISA

79. Badan POM dan ANVISA sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Badan POM dengan Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) Republik Federasi Brasil secara sirkular di Jakarta dan Brasilia pada 16 Juli 2021.

80. MoU ini akan menjadi platform untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan data terkait perkembangan uji klinik vaksin COVID-19; termasuk regulasi di bidang pangan dan produk farmasi, termasuk kebijakan, guidelines, standar, hasil pengujian laboratorium, hasil pengawasan *pre-market*, dan *post-market*, *good manufacturing practices*, asesmen uji klinik, dan sebagainya.

81. Pada 4 April 2024, BPOM dan ANVISA juga telah melakukan pertemuan terkait penerapan *Artificial Intelligence* dalam peredaran produk obat.

Permintaan Donasi Obat dari Pemerintah Brazil

82. Pada tanggal 26 Agustus 2022, Pemerintah Brasil telah mengajukan permintaan donasi 4.000 tablet diethylcarbamazine 50 mg kepada Pemri untuk pengobatan lymphatic filariasis atau kaki gajah.

MoU Kerja Sama Kesehatan

83. Menindaklanjuti pertemuan bilateral Menkes RI dengan pihak Brasil di sela-sela pertemuan G20 tahun 2022, Indonesia menginisiasi pembentukan MoU Kerja Sama Kesehatan antara kedua negara. Bulan Desember 2023, draf MoU Kerja Sama Kesehatan RI-Brasil usulan Indonesia telah dikirimkan kepada pihak Brasil melalui jalur diplomatik.

84. *Zero draft* MoU Kerja Sama Kesehatan RI-Brasil menekankan pada area kerja sama: i) Pengembangan sistem layanan kesehatan; ii) Ketahanan kesehatan; iii) Pembiayaan kesehatan; iv) Pengembangan SDM kesehatan; dan v) Teknologi kesehatan.

85. MoU telah ditandatangani pada saat kunjungan kerja Menkes RI ke Brasil pada tanggal 7 Februari 2024 untuk menghadiri TB Partnership Meeting di Brasilia.

86. Paska-penandatanganan MSP di Bidang KS Kesehatan 2024 dengan Brasil, telah ditindaklanjuti berupa benchmarking antar Kemkes terkait penataan dan penguatan laboratorium kesehatan masyarakat. Selain itu, Menkes telah arahkan untuk memajukan kerja sama teknis nyata dengan Brasil di bidang penanganan DBD, pengembangan vaksin DBD dan malaria, dan akselerasi vaksin TB.

Kerja Sama Kebudayaan

87. Di sela-sela *Culture Ministers' Meeting G20* di Bahia tanggal 6-8 November 2024, Menteri Kebudayaan RI telah bertemu dengan Menteri Kebudayaan Brasil, membahas rencana penyusunan MoU Bidang Kebudayaan. Indonesia sampaikan keinginan untuk mengadakan program residensi seniman secara timbal balik di kedua negara, serta mengusulkan nominasi bersama untuk *Intangible Cultural Heritage* UNESCO. Brasil berminat untuk selenggarakan festival tekstil dan pangan tradisional bersama. Dibahas juga rencana produksi film bersama melalui *matching fund* dan pentingnya angkat budaya sebagai kekuatan untuk keberlanjutan lingkungan seperti kerajinan dari barang bekas.

Kerja Sama Antar Ibu Kota Negara

88. Pada tanggal 17 April 2024, Kepala Otorita IKN dan Gubernur Kota Brasilia-DF menandatangani perjanjian kerja sama tukar pengetahuan dan kerja sama antar ibu kota baru. Brasilia menjadi ibu kota ke-5 yang menjalin kerja sama dengan IKN. Area kerja sama antara lain pengembangan kota pintar dan inisiatif penghijauan, pembangunan infrastruktur, pembangunan komunitas yang tangguh dan inklusif serta mitigasi iklim, upaya adaptasi, dan perencanaan komunitas dalam pembangunan perkotaan.

PERJANJIAN BERJALAN

Politik

1. *MoU on the Establishment of Bilateral Consultations*, Brasilia 18 September 1996
2. *MoU on the Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation*, Brasilia 22 Agustus 2007
3. *Declaration on the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the Federative Republic of Brazil*, Brasilia 18 November 2008
4. *Agreed Minutes of First Meeting Brazil – Indonesia Joint Commission*, Brasilia 15 Oktober 2009
5. *PoA for the Implementation of the Declaration on the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the Federative Republic of Brazil*, Brasilia 15 Oktober 2009
6. *Agreed Minutes of 2nd Meeting of the Joint Commission between the Republic of Indonesia and the Federative Republic of Brazil*, Jakarta, 4 Oktober 2011

7. *Revitalized Plan of Action for the Implementation of the Declaration on the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the Federative Republic of Brazil (2023-2026)*, Jakarta 9 Oktober 2023.
8. *MoU between the National High Court of Brazil (Superior Tribunal de Justiça-STJ) and the Supreme Court of the Republic of Indonesia*, Brasilia, 21 Agustus 2024.

Pertahanan

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters, ditandatangani secara circular Jakarta, 30 Maret 2017 dan Rio de Janeiro, 5 April 2017

Perdagangan

1. *Trade Agreement*, Brasilia, 24 September 1996.
2. *MoU on Enhancing the Promotion of Trade and Investment*, Bali 16 November 2011.

Pertanian

1. *MoU on the Establishment of Consultative Committee on Agriculture*, Jakarta 16 Maret 2007.
2. *Protocol of Intent on Technical Cooperation in the Field of Techniques for the Production of Ethanol Fuel*, Jakarta 12 Juli 2008.
3. *MoU on Cooperation in the Field of Agriculture*, Brasilia 18 November 2008
4. *MoU on Cooperation in the field of Agriculture*, Makassar 10 September 2022
5. *Protocol of Animal Health and Quarantine*, Belem 9 Agustus 2023
6. *Technical Arrangements for Foot and Mouth Disease Vaccine Development Cooperation*, Jakarta 30 Oktober 2023

Energi

MoU on the Energy and Mining Cooperation, Brasilia 18 November 2008.

Perbankan

MoU between Banco Central do Brasil and Bank Indonesia, Brasilia 15 Juli 1997.

Kerja Sama Teknik

Agreement on Technical Cooperation, Bogor 11 Mei 2018

Sosial Budaya

1. *MoU Concerning Educational Cooperation*, Jakarta 12 Juli 2008
2. *MoU On Poverty Eradication*, Brasilia 18 November 2008
3. *MoU Kerja Sama Kesehatan*, Brasilia 7 Februari 2024.
4. *MoU Otorita IKN dengan Pemerintah Brasilia-DF*, Brasilia 17 April 2024

Konsuler

1. *PBVDD*, Jakarta 12 Juli 2008 dan Perpanjangan 5 Desember 2013.
2. *Amendment PBVDD*, Bogor 11 Mei 2018.
3. *Exchange of Signed Notes on Short-Stay Visa Waiver for Holders of Ordinary Passports*, Bogor 11 Mei 2018 (*signed by Foreign Ministers*).
Cat.:
 - Pemri melalui Permenkumham RI No. 29/2021 tentang Visa dan Ijin Tinggal telah memberlakukan subyek visa kunjungan saat kedatangan (VoA) kepada 68 negara termasuk Brasil tanggal 24 Agustus 2021.
 - Pihak Kemlu Brasil telah meminta penjelasan adanya VoA sepihak bagi WN Brasil mengingat WNI pemegang paspor biasa sejak pemberlakuan kesepakatan tidak dikenakan visa memasuki wilayah Brasil.
 - Indonesia telah meminta Brasil untuk kembali mengajukan pemberlakuan kembali BVK.

PENDING ISSUES & AGREEMENTS

Pending di RI

1. *Treaty on International Legal Cooperation in Civil Matters* (Belum Prioritas oleh MA dan Kemenkum)
2. *Agreement on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, Extradition Treaty dan Treaty on the Transfer of Sentenced Persons (TSP)* (Belum Prioritas oleh Kemenkum)
3. *Extradition Treaty* (Belum Prioritas oleh Kemenkum)
4. *Agreement on the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income* (diusulkan menjadi *Exchange of Information and Taxation*)
5. *MoU on Scientific and Technological Cooperation*
6. *MoU on Tourism*
7. *MoU Between Rio Branco Institute of the Ministry of Foreign Affairs of the Federative Republic of Brazil and the Center for Education and Training of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*
8. MSP Kerja Sama Pendidikan Tinggi

Pending di Brasil

1. *MoU on the Establishment of a Working Group on Poverty Eradication*
2. *MoU on Cooperation in Environmental Conservation and Sustainable Use of Forest*
3. *MoU on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors.*
4. *Inter-Parliamentary Corporation between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Chamber of Deputies of the Federative Republic of Brazil.*
5. *Memorandum of Understanding between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and Câmara Dos Deputados of the Federative Republic of Brazil on the Establishment of Parliamentary Friendship Groups.*
6. *MoU in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing Terrorism.*
7. *Investment Cooperation and Facilitation Agreement between the Federative Republic of Brazil and the Republic of Indonesia (ICFA).*
8. *MoU between the Government of the Federative of Brazil and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in the field of Sport.*

Susunan Kabinet Presiden Lula da Silva	
Ministry	Incumbent
President of the Federative Republic of Brazil	Luiz Inácio Lula da Silva
Vice President of the Republic Development, Industry, Trade and Services	Geraldo Alckmin
Chief of Staff of the Presidency	Rui Costa
Minister of Institutional Relations	Alexandre Padilha
Secretary of Social Communication	Sidonio Palmeira
Head of the General Secretariat of the Presidency	Márcio Macêdo
Attorney General	Jorge Messias
Minister of State of the Office of Comptroller General	Vinícius Marques de Carvalho
Minister of State Head of the Institutional Security Office of the Presidency of the Republic	Marcos Antonio Amaro dos Santos

Minister of Agrarian Development and Family Farming	Paulo Teixeira
Minister of Agriculture and Livestock	Carlos Fávaro
Minister of Cities	Jader Barbalho Filho
Minister of Communications	Pedro Lucas Fernandes
Minister of Culture	Margareth Menezes
Minister of Defence	José Múcio
Minister of State for Development and Social Assistance, Family and Fight Against Hunger	Wellington Dias
Minister of Education	Camilo Santana
Minister of Entrepreneurship, Microenterprise and Small Business	Márcio França
Minister of Environment and Climate Change	Marina Silva
Minister of Finance	Fernando Haddad
Minister of Fishing and Aquaculture	André de Paula
Minister of Foreign Affairs	Mauro Vieira
Minister of Health	Alexandre Padilha
Minister of Human Rights and Citizenship	Silvio Almeida
Minister of Indigenous Peoples	Sônia Guajajara
Minister of Integration and the Regional Development	Waldez Góes
Minister of Justice and Public Security	Ricardo Lewandowski
Minister of Labour and Employment	Luiz Marinho
Minister of Management and the Innovation in Public Services	Esther Dweck
Minister of Mines and Energy	Alexandre Silveira
Minister of Planning and Budget	Simone Tebet
Minister of Ports and Airports	Sílvio Costa Filho
Minister of Racial Equality	Anielle Franco
Minister of Science, Technology and Innovation	Luciana Santos
Minister of Social Security	Carlos Lupi
Minister of Sports	André Fufuca
Minister of Tourism	Celso Sabino
Minister of Transport	Renan Filho
Minister of Women	Cida Gonçalves



LAMPIRAN



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id